

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI BUZZER YANG MENYEBARKAN BERITA HOAX



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum

Oleh:

NOVITA CHANDRA ANISAH

NPM 5117500162

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS

PANCASAKTI TEGAL

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI BUZZER YANG
MENYEBARKAN BERITA HOAX**

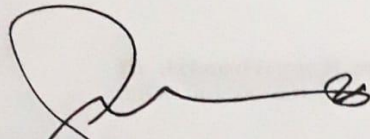
Novita Chandra Anisah

NPM 5117500162

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

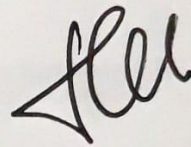
Tegal, 29 Juli 2021

Pembimbing I



Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN 0615067604

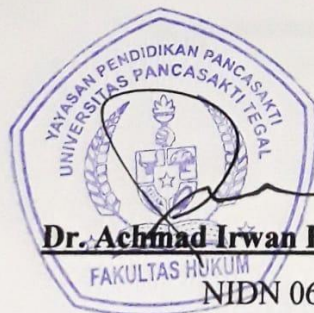
Pembimbing II



Kus Rizkianto, S.H., M.H.
NIDN 0609068503

Mengetahui,

Dekan



Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN 061506760

PENGESAHAN

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI BUZZER YANG MENYEBARKAN BERITA HOAX

Novita Chandra Anisah

NPM 5117500162

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 29 Juli 2021

Penguji I

Dr. Hamidah Abdurrahman, S.H., M.Hum.
NIDN 0022105601

Penguji II

Siswanto, S.H., M.H.
NIDN 0013126401

Pembimbing I

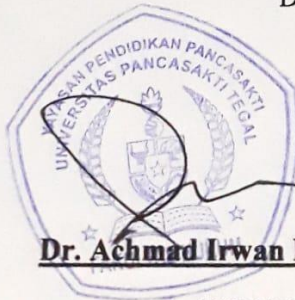
Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN 0615067604

Pembimbing II

Kus Rizkianto, S.H., M.H.
NIDN 0609068503

Mengetahuui,

Dekan



Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.

NIDN 0615067604

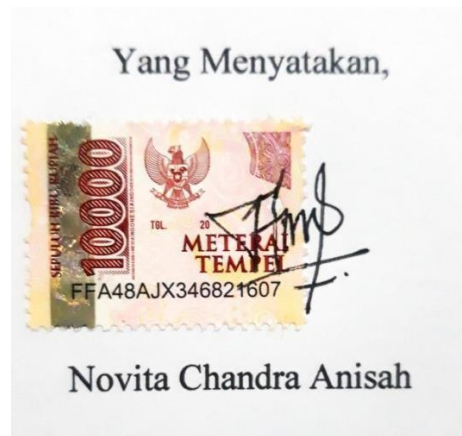
HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novita Chandra Anisah
NPM : 5117500162
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 7 November1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PERTANGGUNG JAWABAN
PIDANA BAGI BUZZER YANG
MENYEBARKAN BERITA HOAX**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri,orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah di tulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 29 Juli 2021



ABSTRAK

Menurut Ketentuan Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 isinya menjelaskan mengenai penghinaan/pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial. Hadirnya media sosial tentu tidak luput dari berbagai istilah yang kemudian muncul di media sosial seperti netizen, follower, influencer, hingga buzzer. Peran ini menjadi berbahaya jika dimanfaatkan untuk membentuk persepsi dan pandangan masyarakat akan kandidat politik tertentu, bahkan hingga membuat dan menyebarkan berita hoax dan hate speech antar lawan politik yang kemudian akan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Kata “Buzzer” pun lambat laun mulai dipandang masyarakat sebagai konotasi negative. Hal ini dapat muncul sebagai akibat dari kegiatan tidak bertanggung jawab Buzzer politik profesional melalui media sosial.

Penelitian ini bertujuan (1) Mengkaji Kinerja Buzzer dalam penyampaian informasi di media sosial, (2) Mengkaji aspek pidana terhadap Buzzer yang menyebarkan berita hoax di media sosial. Jenis penelitian ini termasuk penelitian Kepustakaan (Library Reasearch). Pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan normatif dan metode pengumpulan data dengan metode kepustakaan serta menggunakan metode analisis data secara kualitatif.

Hasil Penelitian ini menunjukan pada peraturan perundangan-undangan di Indonesia yang mengatur tentang menyebarkan berita hoax dalam penyampaian informasi di media sosial, namun belum terdapat aturan yang mengatur secara khusus tentang Buzzer yang ada di media sosial. Akan tetapi dalam kinerja Buzzer untuk menjatuhkan dan mencari tau privasi seseorang selalu terbebas dari tindak pidananya. Dan dalam pencegahannya terdapat aspek pidana terhadap Buzzer, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.11 tahun 2008 Bab VII tentang Perbuatan yang dilarang dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang ITE No.11 Tahun 2008 Bab XI.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci : Buzzer, UU ITE, Berita Hoax

ABSTRACT

According to the provisions of Article 27 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the contents explain the good name that is carried out through social media. The presence of social media certainly does not escape the various terms that then appear on social media such as netizens, followers, influencers, buzzers. This role becomes dangerous if it is used to shape public perceptions and views of certain political candidates, even to spread hoax news and hate speech between political opponents which will then cause divisions in society. The word "buzzer" gradually began to be seen by the public as a negative connotation. This can arise as a result of the irresponsible activities of professional political buzzers through social media.

This study aims to (1) examine the performance of buzzers in delivering information on social media, (2) examine the criminal aspects of buzzers who spread hoax news on social media. This type of research includes library research (Library Research). The approach used is a normative approach and data collection methods with library methods and using qualitative data analysis methods.

The results of this study show that the laws and regulations in Indonesia that regulate the spread of hoax news in the delivery of information on social media, but there are no rules that specifically regulate the buzzer on social media. However, in Buzzer's performance to drop and find out someone's privacy is always free from criminal acts. And in the prevention there is a criminal aspect against Buzzer, the government issued Law No. 11 of 2008 Chapter VII concerning prohibited acts and Article 45 paragraphs (1) and (2) of the ITE Law No. 11 of 2008 Chapter XI.

Based on the results of this research, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.

Keywords : Buzzer, UU ITE, News Hoax

PERSEMBAHAN

Beribu Lafadz syukurku kepada-Mu Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa dan Yang Maha Penyayang. Beribu Lafadz syukur Alhamdulillahirobbilalamin Kepada-Mu saya hanturkan. Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman, jujur dan sabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. Penulis menyadari dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

- ❖ Terima kasih untuk diri saya yang telah kuat melewati titik terberat sebagai mahasiswi dengan tetap sehat dan penuh semangat.
- ❖ Terimakasih Untuk Ayah H.Surana dan Ibu Hj.Wasiatul Maghfiroh. Terimakasih Ayah dan Ibu atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir serta atas limpahan motivasi dan doa yang tak berkesudahan hingga saat ini.
- ❖ Terimakasih Adik-adikku sayang Abraar Faishal Majiid, dan Muhamad Kevin Dhiyaulhaq yang selalu mendoakan dan selalu menghiburku saat penat mengerjakan skripsi.
- ❖ Terimakasih keluargaku yang selalu memberi dukungan agar aku cepat lulus dan doa yang selalu diberikan untukku tanpa henti.
- ❖ Terimakasih Keluargaku Kedua Resimen Mahasiswa 924 GARUDEA teruntuk letingan saya Komandan Didit, Bela, Koko, Lukman, Ibnu yang selalu memberikan semangat dan menghiburku dengan candaan yang receh di Mako.
- ❖ Terimakasih Keluarga Cemaraku Fira, Mariam, Dessy,

Khamdan Dony yang selalu memberikan semangat dan support biar cepat selesai skripsinya.

- ❖ Terimakasih teruntuk Tim Tahu Bulatku Asih, Mb Hikmah, dan Yazid yang selalu memberikan saran-saran dalam proses penulisan skripsi ini dan memberi semangat satu sama lain untuk bisa menyelesaikan skripsi.
- ❖ Terimakasih Sahabat-Sahabat TPQ Ku Anis, Lulu, Umi, Belen, Baihaqi, Dardiri, Ayip. yang selalu ada untukku disaat saya sedang jenuh dan selalu memberimotivasi.
- ❖ Terimakasih teruntuk Ulfina Naziroh dan seluruh teman-teman Kelas E Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Angkatan 2017 yang selalu berbagi ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang luarbiasa.
- ❖ Terimakasih untuk seluruh pihak yang terkait atas selesainya penulisan skripsi ini.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan menjadi amal baik yang diterima oleh Allah SWT. Akhir kata penulis berharap semoga penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis selanjutnya dan bagi semua pembaca, serta berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

MOTTO

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut Ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan agar kamu bersyukur.”

-Q.S. An-nahl 16 : 78-

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”

-Q.S. Al-Baqarah ayat 216-

“Belajarlah mengucapkan syukur dari hal-hal baik di hidupmu, dan Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidupmu.”

-Bacharuddin Jusuf Habibie –

“Dalam hukum seorang bersalah ketika Ia melanggar hak orang lain. Dalam etika Dia bersalah jika Ia hanya berfikir untuk melakukannya.”

-Immanuel Kant-

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur khadirat Allah SWT Alhamdulillah skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Stui Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW yang membawa rahmat untuk kita semua. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut di ucapkan terimakasih. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Pancasakti Tegal Prof.Dr.Fakhruddin,M.Pd.
2. Dekan Fakultas Hukum Dr. H. Achmad Irwan Hamzani,S.H.I.,M.Ag.
3. Wakil Dekan I Kanti Rahayu,S.H.,M.H
4. Wakil Dekan II H. Toni Haryadi, SH.,MH
5. Wakil Dekan III Imam Asmarudin, SH.,MH
6. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Muhamad Wildan,S.H.,M.H
7. Dosen Pembimbing I Dr. H. Achmad Irwan Hamzani,S.H.I.,M.Ag.. dan Dosen Pembimbing II Kus Rizkianto, S.H., M.H.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT sebagai Amal Shalih.
9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar danramah.
10. Orangtua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moral pada penulis dalam menempuh studi.
11. Kawan-kawan penulis dan semua pihak yang memberikan motivasi dan menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 29 Juli 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters and flourishes.

Novita Chandra Anisah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Gambaran Umum tentang Buzzer	16
B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	35
C. Definisi Operasional	61

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Cara Kerja bagi Buzzer dalam penyampaian Informasi di Media Sosial	64
B. Pertanggungjawaban pidana bagi Buzzer yang menyebarkan berita Hoax di Media Sosial	77

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka	93
----------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Daftar Riwayat Hidup	100
----------------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Buzzer di media sosial dipandang efektif dalam memasarkan suatu produk. Tidak hanya itu pekerjaan sebagai *buzzer* itu juga dinilai sangat menjanjikan. Menjadi *buzzer* tidak sebatas para artis atau orang terkenal saja, namun orang biasa tetapi memiliki *followers/friends* di akun media sosialnya hingga jutaan bisa saja menjadi *buzzer* dengan penghasilan yang tinggi.¹ Pekerjaan *buzzer* dianggap tidak terlalu sulit, karena hanya dengan memiliki akun di media sosial, memasarkan produk/jasa, dan bisa dilakukan kapan dan dimana saja, seorang *buzzer* dapat memperoleh penghasilan yang menjanjikan. Karena keberhasilannya di bidang marketing tersebut, jasa *buzzer* banyak digunakan berbagai kalangan, mulai dari perusahaan yang memiliki *brand* yang sudah terkenal hingga orang biasa yang baru membuka usaha startup untuk memasarkan produk/jasa mereka. Bahkan di bidang politik, profesi *buzzer* ini malah menjadi sebuah keharusan untuk ada dalam proses marketing partai politik maupun pemilihan kepala daerah atau kepala negara. *Buzzer* dianggap salah satu aktor paling penting dalam penggalangan opini di dunia maya yang menjalankan fungsi pemasaran.²

¹ Shiqid sugono, Fenomena Industri Buzzer di Indonesia : Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.4 Tahun 2020, hlm.4

² *Ibid*

Buzzer berperan menyebarkan gagasan dan membentuk opini publik untuk membentuk rasa demokrasi publik.³ Gagasan dan opini yang disebarkan oleh *buzzer* ini dapat menciptakan paradigma baru dimasyarakat tentang suatu peristiwa. *Buzzer* bebas menciptakan suatu opini untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat yang menggunakan media sosial. Keberadaan media sosial seharusnya dipergunakan untuk memperkuat hubungan atau mencari hubungan dengan orang lain. Namun, aktivitas individu di media sosial cenderung seenaknya dalam mengeluarkan pernyataan. Beberapa netizen di media sosial bahkan saling menyerang, melecehkan atau mencederai identitas yang sudah dimiliki oleh individu lainnya. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan individu dalam literasi media sosial itu sendiri.⁴

Peran ini menjadi berbahaya jika dimanfaatkan untuk membentuk persepsi dan pandangan masyarakat akan kandidat politik tertentu, bahkan hingga membuat dan menyebarkan berita-berita hoax dan *hate speech* antar lawan politik yang kemudian akan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Kata '*buzzer*' pun lambat laun mulai dipandang masyarakat sebagai sebuah konotasi negative. Hal ini dapat muncul sebagai akibat dari kegiatan tidak bertanggung jawab *buzzer* politik profesional melalui media sosial.

Internet digunakan sebagai media komunikasi dan informasi, berperan merevolusi sistem, struktur dan proses demokrasi yang selama ini

³ Arigi, F, *Pengamat Ungkap Privilese Buzzer Istana, Salah Tak Kena UU ITE*, Jakarta : Rajawali, , 2019, hlm.45

⁴ *Ibid*

diterapkan.⁵ Sehingga memunculkan istilah baru digitalisasi yang menggambarkan keadaan politik di Media sosial dan bagaimana keadaan kehidupan di dunia Internet⁶. Perkembangan industri media di Indonesia memiliki peranan penting pada kehidupan masyarakat. Aktivitas komunikasi pun meningkat pesat seiring berkembangnya teknologi komunikasi terutama media digital, didukung dengan ditemukannya internet, media digital menjadi media terbesar yang dipilih masyarakat sebagai media komunikasi. Tingkat akses informasi yang sangat cepat tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Melalui internet siapapun bebas memproduksi mendistribusi dan mengkonsumsi berita yang beredar di internet.⁷

Penggunaan media sosial di Indonesia sudah sangat banyak, sehingga menyebabkan keterbukaan informasi teknologi yang telah menyusup hingga ke setiap sendi kehidupan. Hampir semua kegiatan sehari-hari bersentuhan dengan teknologi. Sebab, perkembangan di sektor itu begitu pesat bergulir. Sayangnya, perkembangan teknologi juga membawa risiko tersendiri. Tindakan pidana berbasis teknologi atau *cyber crime* kini telah menjelma sebagai ancaman yang kerap menghantui aktivitas media social. Indonesia sebagai negara Hukum menyusun Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik untuk melindungi seluruh warga negara Republik Indonesia, namun didalam Undang-undang tersebut, memuat satu pasal yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, yaitu pasal 27

⁵ Firmansyah, *Marketing Politik :Antara Pemahaman dan Realitas*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 22

⁶ Fayakhun Andriadi, *Demokrasi di tangan Netizen*, Jakarta : RM Books, 2016, hlm. 149

⁷ Buty Eka Safitri, et al., *Peranan Buzzer Politik Membentuk Opini Masyarakat Melalui Pemilu Di Media Sosial*, Tangerang : Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2019, hlm.1

ayat (3) yang memuat unsur-unsur muatan penghinaan/ pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial.

Menurut catatan Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), lebih dari seratus orang yang terjerat kasus terkait Undang-undang Informasi Teknologi dan Elektronik hingga November 2015. Kebanyakan kasus tersebut mencuat pada tahun 2014 dan 2015 yang menjerat 85 orang. Padahal, pada waktu Undang-undang Informasi Teknologi dan Elektronik baru berlaku, hanya 2 orang yang dijerat menggunakan aturan tersebut⁸ Dari banyaknya kasus atas nama pelanggaran Undang-undang Informasi Teknologi dan Elektronik, kebanyakan merupakan kasus pencemaran nama baik. Sisanya, penodaan sebanyak 5% dan ancaman hanya 1%. Selain itu, ada pula 5 kasus somasi dan 1 kasus pornografi⁹.

Hadirnya media sosial tentu tidak luput dari berbagai istilah yang kemudian muncul di media sosial seperti *netizen*, *followers*, *influencer*, hingga *buzzer*. *Buzzer* berasal dari bahasa Inggris yang berarti lonceng, bel, atau alarm sedangkan dalam *Oxford Dictionaries*, *buzzer* diartikan sebagai ‘*An electrical device that makes a buzzing noise and is used for signalling*’ yakni perangkat elektronik yang digunakan untuk membunyikan dengungan guna menyebarkan sinyal atau tanda tertentu¹⁰

Peran ini menjadi berbahaya jika dimanfaatkan untuk membentuk persepsi dan pandangan masyarakat akan kandidat politik tertentu, bahkan

⁸<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt564aecdae930b/telan-banyak-korban--dpr-diminta-revisi-uu-ite?page=1>

⁹*Ibid*

¹⁰ Riris Loisa Felicia, “Peran Buzzer Politik dalam Aktivitas Kampanye di Media Sosial Twitter”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 2, No. 2, 2018, hlm. 12

hingga membuat dan menyebarkan berita-berita hoax dan hatespeech antar lawan politik yang kemudian akan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Kata '*buzzer*' lambat laun mulai dipandang masyarakat sebagai sebuah konotasi negatif, hal ini dapat muncul sebagai akibat dari kegiatan tidak bertanggung jawab *buzzer* politik profesional melalui media sosial. Aktivitas seorang *buzzer* politik hingga diusulkan menjadi sebuah profesi terlarang. Melansir didalam artikel Kompas.com menyatakan bahwa, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo berjanji bahwa pemerintah akan berupaya melawan fitnah dan kebohongan yang disebarkan para *buzzer* politik. Salah satunya dengan membentuk Badan Siber Nasional¹¹

Permasalahan tersebut tidak lepas dari pengaruh seorang *Buzzer*, *Buzzer* merupakan seseorang yang memiliki pengaruh besar di media sosial dengan mengandalakan *followers*nya yang berjumlah banyak, dan memiliki banyak kemampuan untuk memberikan stimulant untuk membawa kepentingan dalam menyampaikan sebuah informasi dan memiliki kepentingan khusus.

Buzzer dikenal sebagai orang yang memanfaatkan akun media sosial miliknya guna menyebarkan informasi dan melakukan promosi seperti iklan pada Hubungan *buzzer* dengan promosi sangat erat karena mengacu kepada tujuan promosi yaitu menginformasikan, membujuk dan mengingatkan. Penyampaian pesan yang dilakukan oleh *buzzer* dalam mempromosikan suatu kegiatan atau event di media sosial dilakukan dengan mengkombinasikan

¹¹*Ibid*

caption beserta foto yang menarik dan sesuai dengan produk atau jasa suatu kegiatan atau event yang di promosikan oleh *buzzer*. Dengan adanya publikasi dan promosi ekonomi kreatif melalui *buzzer-buzzer*, masyarakat akan mudah mengakses dan mendapatkan informasi pertayangannya yang lebih akurat dengan memanfaatkan android.¹² Pelaku Industri Buzzer telah memanfaatkan momentum kontestasi politik Indonesia untuk mendapatkan rofit financial. Isu mengenai Identitas ataupun kehidupan pribadi seseorang telah diubah menjadi suatu komoditas untuk menciptakan pesan-pesan politik yang kurang berkualitas. Buzzer politik telaah menggunakan segala kini media sosial untuk melancarkan aksinya sehingga dapat memperluas jangkauan khalayak. Industri Buzzer pada akhirnya dinilai sebagai kemunduran dalam menggunakan media komiunikasi karena turut menyampaikan pesan-pesan yang dinilai tidak mengindahkan berbagai etika. Walaupun bukan hanya saat kontestasi politik saja, Buzzer digunakan oleh orang-orang tertentu yang hangat dan dekat dengan elite politik untuk menjatuhkan atau menaikkan nama seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang diberlakukan. Melihat situasi yang semakin marak di dalam Demokrasi Indonesia.

¹² Rismi Juliadi, "The Construction of Buzzer Identity on Social Media (A Descriptive Study of Buzzer Identity in Twitter)", *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, *Jurnal Internasional*, Vol 150, 2017, hlm. 347

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan penulis teliti adalah :

1. Bagaimanakah cara kerja *Buzzer* dalam penyampaian informasi di media sosial?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap *Buzzer* yang menyebarkan berita hoax di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini untuk mengkaji :

1. Mengkaji cara kerja *Buzzer* dalam penyampaian informasi di media sosial
2. Mengkaji pertanggung jawaban pidana terhadap *Buzzer* yang menyebarkan berita hoax di media sosial

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat penelitian :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat penelitian sebagai referensi bagi peneliti lainnya sebagai kerangka teoritis untuk melakukan perkembangan ilmu hukum yang bergerak secara *interdisipliner* dengan ilmu pengetahuan teknologi Internet, dan menjadi sebuah gagasan baru untuk menentukan perkembangan Ilmu Hukum yang positif dalam bidang *cyber crime* di Indonesia.

2. Secara Praktik

Peneliti berharap, penelitian ini mampu menjawab tantangan global tentang permasalahan Buzzer yang selama ini sudah hadir didalam masyarakat, serta telah menjadi kejahatan Cyber didalam dunia maya, sehingga mampu memanipulasi data-data yang tidak benar (Hoaks) dan penulis berharap dapat mendukung setiap peran pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi Buzzer yang telah menyebarkan *issue Hoax* terkait Media komunikasi melalui internet yang menjadi sumber informasi tercepat dan *ter-update*

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang membahas mengenai Permasalahan Buzzer merupakan konsep baru yang muncul akibat perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum yang harusnya berjalan beriringan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut membuat penelitian ini masih sangat sedikit yang membahas kajian terkait masalah tersebut :

1. Riris Loisa Felicia¹³, “*Peran Buzzer Politik dalam Aktivitas Kampanye di Media Sosial Twitter*”. Penelitian ini membahas tentang peran Buzzer politik professional hanya mengutamakan imbalan yang diberikan oleh seorang atau kelompok, dan menggunakan Hastag sebagai upaya penyebaran semakin cepat dalam menyampaikan sebuah informasi di media sosial atas dasar inisiatif pribadi dan dilandaskan oleh kesamaan

¹³ Riris Loisa Felicia, “Peran Buzzer Politik dalam Aktivitas Kampanye di Media Sosial Twitter”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 2, 2018, No. 2, hlm. 345

ideologi.¹⁴ Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah membahas kinerja *buzzer* dalam menyampaikan informasi di media sosial dapat berpengaruh atau tidak berpengaruh dalam penyampaian berita yang disampaikan.

2. Christiany Juditha¹⁵, “*Buzzer di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu Indonesia*”. Penelitian ini membahas tentang alat komunikasi *buzzer* dalam menyebarkan informasi hanya melalui media sosial Media sosial untuk memenangkan sebuah pilkada dan pemilu Indonesia dengan menyebarkan ujaran kebencian dalam menyampaikan sebuah informasi.¹⁶ Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengkaji permasalahan *buzzer* yang menyebarkan berita hoaks, dengan menerapkannya kedalam hukum positif Indonesia.
3. Mohamad Imam Kurniawan¹⁷, “*Proses Simultan Dalam Pembentukan Opini Melalui Media Sosial (Studi Kasus Buzzer Dalam Kontestasi Pemilihan Presiden 2019)*”. Penelitian ini membahas tentang *Buzzer* yang dijadikan alat kontrol atau pengendali bagi para politisi dalam menyebarkan berita-berita yang diinginkan oleh para politisi agar dapat mengubah pilihan masyarakat atau meyakinkan bahwa calon yang didukung oleh kelompok *buzzer* merupakan pilihan yang tepat.¹⁸

¹⁴*Ibid.*, hlm. 358

¹⁵ Christiany Juditha, “*Buzzer di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu Indonesia*”, Prosiding Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika. Jakarta, 2019, hlm.290

¹⁶*Ibid.*, hlm. 210

¹⁷Kurniawan, Mohamad Imam, “*Proses Simultan Dalam Pembentukan Opini Melalui Media Sosial “, Studi Kasus Buzzer Dalam Kontestasi Pemilihan Presiden*, Skripsi Sarjana Hukum, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019, hlm. 60

¹⁸*Ibid.*, hlm. 74-75

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah menjelaskan aspek pidana bagi para *buzzer* yang melakukan kejahatan di dunia internet dengan menyebarkan berita bohong kepada masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian Kepustakaan (*Library Reasearch*). Penelitian kepustakaan adalah Penelitian yang menggunakan data sekunder. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena menggunakan data sekunder berupa dokumen hukum yang dilihat pada peristiwa yang terjadi dengan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum¹⁹ data sekunder tersebut akan digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada²⁰. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban)²¹ karena yang dikaji adalah konsep hukum sebagai asas keadilan dalam sistem moral dan sebagai kaidah dalam perundang-

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke- 9, Jakarta :Sinar Grafika, 2017, hlm. 24

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. ke – 11., Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13–14

²¹ Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5, No. 3, 2006, hlm. 50

undangan, khususnya dasar filosofis dan legalitas dalam penanganan perkara penyebaran berita hoaks dalam perkara pidana.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Normatif. Pendekatan Normatif adalah pendekatan yang meninjau permasalahan hukum secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut hukum positif)²³ Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif karena meninjau permasalahan “*Aspek Pidana terhadap Buzzer dalam menyebarkan berita Hoaks melalui media sosial*” menggunakan perspektif hukum positif. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data-data yang diterima oleh peneliti untuk dikaji boleh atau tidak boleh hukum yang berlaku di dalam penanganan buzzer yang menyebarkan berita hoaks melalui media sosial dengan pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum²⁴ yang didasari dengan Legal formal.²⁵ Penulis menggunakan model kualitatif pada penelitian ini dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan oleh responden secara lisan atau tertulis dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

²²Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, 2002, hlm. 147-176

²³ Amirudin dan Zainal Asyikin, *op.cit.*, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.135

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 93

²⁵Rosihon Anwar, et al., *Pengantar Studi Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2009, hlm. 54

Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.²⁶

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak ada dipublikasikan secara umum. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder karena hanya menggunakan dokumen-dokumen hukum yang telah tersedia. Adapun cara penulis mendapatkan sumber hukum sekunder dari pengumpulan literasi yang berupa Sumber data yang akan digunakan oleh Penulis yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.²⁷ Data ini diperlukan untuk menjadi rujukan dalam pengaturan hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan *cyber crime* dalam perkembangan hoaks yang disebarkan oleh Buzzer dengan menentukan bahan hukum. Adapun Bahan Hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum dimaksud meliputi :

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm. 32

²⁷ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 156

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung keberadaan bahan hukum primer. Dalam riset ini bahan hukum dimaksud berupa buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terkait Penyebaran berita hoax oleh Buzzer, serta hasil wawancara dengan narasumber.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung keberadaan bahan hukum sekunder, seperti Black Law Dictionary dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian melalui Penelusuran Kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui penelusuran kepustakaan karena hanya menghimpun dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Penelusuran dokumen dapat dilakukan secara *offline* dan *online*. Penelusuran Kepustakaan adalah pengumpulan data serta bahan-bahan yang ada relevansinya dengan pembahasan ini, dan akan dikaji dengan pengaturan-pengaturan yang menjadi sumber data. Dalam hal ini penulis menempuh cara sebagai berikut Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Dalam melakukan penelitian kepustakaan, penulis membaca dan meneliti peraturan

perundang-undangan, buku-buku, jurna; ilmiah, artikel-artikel dalam berbagai media massa serta beberapa tulisan lain yang dianggap relevan dengan materi yang dibahas.

5. Metode Analisis Data

Analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi²⁸dengan menerapkan bahan-bahan hukum yang terkumpul diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis, dan merupakan hasil dari proses interpretasi peneliti terhadap bahan hukum yang dihasilkan berdasarkan dasar Normatifdalam pemberian hukuman kepada para pelaku penyebar berita hoaks melalui Buzzer didalam perkara pidana.

Teknik analisa data dengan menggunakan metode induktif merupakan teknik analisa yang dilakukan dengan cara mengomparasikan sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian atau dengan kata lain metode induktif adalah metode analisa data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁹Penelitian ini merupakan reduksi data/bahan hukum berkaitan dengan pengaturan alat bukti elektronik dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP yang bisa dijadikan dasar hukum tentang pemberian hukuman kepada Buzzer terhadap berita hoaks yang disampaikan melalui media sosial.

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 8-9

²⁹Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 1989, hlm. 66

Setelah diidentifikasi dan ditemukan sejumlah perundang-undangan pidana yang mengatur tentang alat bukti elektronik, langkah selanjutnya adalah menyajikan data/bahan hukum yang telah ditemukan parameternya. Penyajian data/bahan hukum ini bermakna sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data/bahan hukum yang sering dilakukan adalah teks naratif. Berdasarkan timbulnya variabel, jenis penelitian ini termasuk pada penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini merupakan usaha mengungkapkan dan memformulasikan data lapangan dalam bentuk verbal (kata-kata).³⁰

G. Sistematika Penulisan

Rencana laporan penelitian ini akan disusun dalam empat bab yang masing-masing saling berkaitan. Keempat bab tersebut sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini memuat Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Konseptual, dalam bab ini menguraikan tinjauan tentang pengertian *Buzzer*, Faktor-faktor yang menyebabkan *Buzzer* menyebarkan berita hoaks, penjelasan regulasi yang melarang adanya *Buzzer* menyampaikan berita hoaks.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini menjelaskan hasil dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, dari Cara Kerja *Buzzer* dalam Penyampaian Informasi di Media Sosial, dan menjelaskan Pertanggung Jawaban Pidana terhadap *Buzzer* yang Menyebarkan Berita Hoax di Media Sosial.

³⁰Fajrul Hakam Chozin, *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah*, Sumatra : Alpha Grafika, 1997, hlm.47

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Gambaran Umum tentang *Buzzer*

1. Pengertian *Buzzer*

Istilah *Buzzer* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) belum memiliki padanan kata yang dibakukan, karena istilah *Buzzer* yang berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti alarm, atau lonceng.³¹ Istilah *Buzzer* sendiri mulai digunakan untuk membahas persaingan politik di dunia digital. *Buzzer* selalu dihubungkan dengan intervensi seseorang atau kelompok untuk mendukung, memperbaiki nama baik, menghasut dan lainnya sebagai bentuk pencitraan di dunia maya agar keinginan orang yang mempekerjakan *Buzzer* tersebut merasa puas.

Istilah *Buzzer* mulai tidak murni digunakan banyak orang saat media massa mulai memenuhi era milenial, dan menjadi perhatian khusus bagi para elite politik, yang digunakan sebagai alat untuk mendukung dan membela kepentingan mereka. *Buzzer* politik adalah sebuah kelompok yang mendengungkan atau mengkapanyekan sebuah hal terkait politik, baik itu berupa promosi atau issue melalui akun media sosial.³²

Buzzer secara etimologi berarti peran sebuah Alarm atau lonceng yang berfungsi untuk menyampaikan pengumuman atau mengumpulkan orang. Enda Nasution juga mengartikan istilah *Buzzer* sebagai kelompok orang yang menyebarkan informasi dan tidak memiliki identitas untuk

³¹<https://divedigital.id/Buzzer-adalah/>, diakses pada tanggal 4 Desember 2020, Pukul 20.00 WIB

³²*Ibid*

dipertaruhkan yang dibelakangnya ada motif ekonomi maupun ideologi. Aktivitas menyebarkan informasi oleh *Buzzer* ada yang dibayar dan ada juga yang dilakukan secara sukarela tanpa perintah dari pihak lain. *Buzzer* juga memiliki padanan kata lain atau istilah sebagai pendengung.³³

Kamus Oxford Dictionaries, *Buzzer* diartikan sebagai perangkat elektronik yang digunakan untuk membunyikan dengungan guna menyebarkan sinyal atau tanda tertentu. *Buzzer* pada awalnya digunakan untuk mempromosikan suatu produk tertentu dengan atau tanpa imbalan. Namun, sejak tahun 2014, ketika pemilihan umum (pemilu) dilaksanakan di Indonesia, jasa *Buzzer* mulai dilirik oleh aktor-aktor politik.³⁴

Buzzer dapat dianalogikan sebagai akun yang memiliki pengaruh besar atau *influencer* terhadap pengikut/*follower* atau teman/*friends* dan diharapkan bisa membuat sebuah topik di dunia *online* tapi juga in real world.³⁵ *Buzzer* selalu menarik para pihak elite politik untuk membayar mereka didalam kegiatan-kegiatan tertentu. Kegiatan-kegiatan pemilihan umum selalu dihubungkan dengan bekerjanya *Buzzer*, padahal *Buzzer* dapat bekerja saat Pemilihan Umum ataupun Pasca Pemilihan Umum.

Buzzer merupakan salah satu dari strategi pemasaran yang terbilang baru. Secara harfiah, *Buzzer* memiliki arti sebuah komponen

³³ Enda Nasution, Perbedaan Istilah Buzzer dan Influecer, Jakarta : Raja Grafindo, 2016, hlm.5

³⁴ Christiany Juditha, *Buzzer* di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu Indonesia, Manado : Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Komunikasi dan Informatika, Prosiding Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika #3 Tahun 2019: 199-212, hlm.201

³⁵ Arbie, Rivani. (2013). Twitter is Money. Jakarta: Mediakita, hlm. 5

elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Prinsip kerja *Buzzer* hampir sama dengan loudspeaker (pengeras suara) yang menghasilkan suara yang bising sehingga menarik perhatian.

Kegiatan utama yang dilakukan *Buzzer* adalah kegiatan pemasaran dimana seorang individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka mau dan butuhkan melalui menciptakan atau menukarkan barang dan nilai dengan satu sama lain.³⁶ *Buzzers* selalu mendapatkan keuntungan materiil sebagai hasil kerja kerasnya dalam menggunakan media sosial dalam memihak para elite politik yang menyuruhnya, walaupun masih saja terlihat *Buzzer* yang bersifat netral dengan tidak memihak salah satu elite politik dengan cara menunjukkan kebenarannya. Namun, hal tersebut tidaklah mudah dilakukan oleh banyak orang, karena pekerjaan *Buzzer* ini sudah secara sistematis, sehingga ketika ada orang yang mengganggu pekerjaan *Buzzer*, maka *Buzzer* yang bersifat netral akan mengalami gagal koneksi ke dunia maya dengan memblok akun-akun mereka.

Berbagai upaya dilakukan demi kepentingan materiil, dunia maya semakin bebas digunakan oleh siapapun, rentan sekali anak-anak atau orang-orang dewasa yang tidak tau apa-apa menjadi korban para *Buzzer*, karena niat dan tujuan mereka demi membela para elite politik tercapai. Pemahaman ini perlu diluruskan agar nantinya masyarakat tidak mudah termakan berita hoaks yang disebarkan oleh para *Buzzer*. Untuk

³⁶Philip Kotler and Gary Armstrong, *Prinsip Prinsip Pemasaran*, Edisi 1, Jilid 1, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 52

mengetahui gambaran buzzer lebih jauh, perlu diketahui ciri-ciri akun buzzer dan cara bekerjanya Buzzer dalam dunia maya.

2. Ciri-Ciri Akun *Buzzer*

Praktik menggunakan *Buzzer* sebagai media promosi atau melakukan serangan balik kepada lawan di sosial media memang sudah sering dilakukan oleh banyak pihak. Hal ini kadang membuat kita sebagai pengguna sosial media bingung nama yang benar dan mana yang salah. Agar dapat mengetahui informasi atau narasi yang coba didengungkan oleh *Buzzer*, ciri-ciri dari akun *Buzzer* perlu diketahui agar tidak mudah menerima berita hoaks. Adapun ciri-ciri dari akun Buzzer adalah :

a. Akun Anonim

Sejalan dengan pengertian yang telah disampaikan, akun *Buzzer* biasanya tidak memiliki identitas untuk dipertaruhkan, bahkan kadang identitasnya tidak jelas alias akun anonim.

b. Pola Terstruktur

Biasanya *Buzzer* bekerja atas sebuah intruksi untuk menyebarkan sesuatu, biasanya apa yang orang lain sebarkan memiliki pola yang terstruktur, tidak seperti halnya ketika membicarakan sesuatu di sosial media.

c. Isi muatan informasi Tidak Masuk Akal

Karena seseorang itu bekerja atas permintaan suatu pihak, kadang informasi yang mereka sampaikan tidak bisa dipertanggung jawabkan dan tidak masuk akal.

d. Pembahasan Issue

Mempunyai sifat yang sama yaitu *Buzzer* biasanya bekerja untuk menyebarkan informasi tertentu dalam kurun periode yang sudah disepakati, selama masa itu, mereka biasanya hanya akan fokus pada issue itu saja.

e. Bekerja secara Kelompok

Informasi yang mereka sampaikan tidak masuk akal, biasanya mereka bekerja secara berkelompok yang mencoba untuk membuat obrolan agar mengalir dan tanpa direkayasa. Perbuatan yang dilakukan mereka membuat orang yang tidak tahu menjadi kebingungan, karena ada orang lain yang juga menyuarakan hal yang sama.

3. Cara Kerja *Buzzer*

Cara lain agar seseorang itu tidak terjebak dalam informasi yang disebarkan oleh *Buzzer* adalah mengetahui cara kerjanya. Cara kerja *Buzzer* bisa dibilang terus berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi dan algoritma yang ada. Tidak hanya menyebarkan informasi saja, “*Buzzerpro*” biasanya sudah merencanakan aksinya dengan sangat matang. Dimulai dari membuat issue yang harus dilempar ke sosial media, melakukan pemetaan terhadap *audience* agar *issue* yang mereka angkat

bisa viral dan terlihat organik, bahkan juga menggunakan *tools*, algoritma, sampai *akun bot*.

Cara Kerja Buzzer memiliki beberapa cara³⁷ :

a. Pengadaan Kontrak kerjasama dengan para elite politik

Para Buzzer akan melakukan kontrak kerjasama dahulu sebelum mereka bekerja secara kelompok, agar nantinya para buzzer bekerja sesuai keinginan para elite politik dan mendukung setiap issue yang nantinya akan diangkat oleh para elite politik.

b. Pembentukan Tim Kecil

Para Buzzer akan membentuk tim kecil paling sedikit adalah 10 orang, karena buzzer tidak dapat bekerja sendirian, karena tujuan besar untuk menghasut, dan mempengaruhi setiap orang diperlukan dukungan moral oleh buzzer itu sendiri agar berita atau informasi yang diberikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, walaupun bisa saja berita atau informasi yang diberikan adalah hoaks.

c. Perencanaan Issue

Tema Issue yang akan dikerjakan para buzzer harus direncanakan dengan matang, agar para pembaca di media sosial percaya dengan berita yang disajikan.

d. Pemetaan Audience

Pemetaan audience dilakukan dengan cara membagi tim kecil dengan beberapa akun media sosial yang mendukung adanya berita yang

³⁷Jonathan Patrick, *Taktik Licik Buzzer Politik*, pada website : <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201210130825-185-352433/taktik-licik-buzzer-politik>, diakses pada tanggal 20 Desember 2020

disampaikan, agar para pembaca dibingungkan dan diyakinkan bahwa berita yang disampaikan benar. Para buzzer akan membentuk akun media sosial di setiap aplikasi media sosial yang digunakan, seperti Instagram, grup whatsapp, twitter, dan facebook.

e. Bahasa yang digunakan bersifat Provokatif

Logika berfikir yang digunakan oleh para Buzzer akan menggunakan logika berfikir yang bersifat provokatif, sehingga akan mempengaruhi fikiran-fikiran pembaca informasi tersebut untuk mendukung informasi yang dishare oleh para Buzzer.

4. Faktor Penyebaran Hoaks Oleh *Buzzer*

Para aktor politik yang menggunakan jasa Buzzer baik dalam kontestasi pemilu yang diusung satu partai atau koalisi partai atau Pasca Pemilu, saling berlomba-lomba untuk melibatkan buzzer secara organik dalam tim sukses yang telah mereka buat. Buzzer-buzzer yang terlibat dalam kampanye di dunia maya bisa berasal dari relawan, kader dari partai itu sendiri, atau orang lain yang sengaja dibayar untuk menjadi buzzer politik. Secara umum, buzzer politik bertugas untuk mengenalkan visi, misi dan program dari peserta pemilu maupun elite politik di dunia maya. Buzzer politik juga bertugas untuk mengolah opini publik yang diamplifikasi sedemikian rupa, sehingga dapat

menaikan popularitas, elektabilitas dan akseptabilitas peserta pemilu di tengah-tengah masyarakat.³⁸

Berita bohong (*hoax*) adalah berita yang disampaikan kepada orang lain dan didalam muatan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya.³⁹ Pengertian berita bohong (*hoax*) menurut *Cambridge English Dictionary* merupakan ”perencanaan untuk menipu seseorang” sementara menurut *Merriam-Webster* merupakan “strategi/trik/siasat agar orang mau mempercayai atau menerima sesuatu informasi sebagai yang asli padahal palsu dan sering tidak masuk akal”. *Hoax* dapat diartikan sebagai informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, dengan tujuan agar orang dapat mempercayai informasi tersebut dan dapat disebarluaskan kembali.⁴⁰

Berita bohong (*hoax*), berasal dari kata *hocus*, yang memiliki arti mengecoh atau menipu. Secara umum berita bohong (*hoax*) artinya adalah kabar burung atau kabar bohong – sebuah kabar atau cerita bohong yang sengaja dibuat, seolah-olah kabar atau cerita tersebut benar adanya.

Dijelaskan juga berita bohong (*hoax*) dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 28, yang berbunyi:

“(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

³⁸ Juditha, C. (2019), *Buzzer di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika, hlm. 207

³⁹ Chazawi Adami dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 236

⁴⁰ Reni Julani, *Op.Cit.* hlm. 143

(2) *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)."*

Berita bohong (*hoax*) beberapa tahun terakhir menjadi suatu fenomena yang sangat ramai diperbincangkan oleh masyarakat di Indonesia karena, banyaknya berita – berita dan juga perkembangan teknologi internet serta media elektronik untuk masyarakat mengakses informasi. Salah satu fenomena yang marak terjadi saat ini adalah banyaknya berita bohong (*hoax*) yang beredar di media elektronik. Muhammad Alwi Dahlan, ahli komunikasi dari Universitas Indonesia (UI), berpendapat bahwa berita bohong (*hoax*) merupakan manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan atau pemahaman yang salah. Hal itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun kecanggihan teknologi membuat penyebaran kabar tersebut menjadi lebih luas dan menjadi prestasi tersendiri bagi sang pembuat berita bohong (*hoax*) jika ia berhasil menyebarkanluaskannya.⁴¹

Berita bohong adalah berita yang di dalamnya terdapat isi yang tidak sesuai dengan kebenaran atau keadaan yang ada sebenarnya (*materiële waarheid*).⁴² Secara singkat berita bohong (*hoax*) adalah suatu informasi dimana di dalamnya tidak ada suatu kebenaran atau bohong. Menurut *Cambridge Dictionary*, kata *hoax* sendiri berarti tipuan atau

⁴¹Ilham, Nasional Republika, *Hoax Merupakan Kabar Direncanakan*, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/01/11/ojm2pv361-ahli-hoaxmerupakankabar-yang-direncanakan>, diakses pada 06 Desember 2020, pukul 13.04

⁴²Chazawi Adami dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan...*, Op.Cit., hlm. 236

gurauan. Kegiatan menipu, trik penipuan, rencana penipuan disebut dengan *hoax*.⁴³ Berita bohong (*hoax*) adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu.⁴⁴

Hoax adalah berita bohong yang sengaja dibuat dan disebar luaskan untuk menimbulkan ketakutan atau kehebohan. Selain itu terdapat pula *hoax* yang diciptakan untuk menipu publik. *Hoax* (berita bohong) ini jika sebelumnya banyak disebar lewat SMS dan email, kini mulai berpindah ke pesan aplikasi chatting seperti WhatsApp atau BBM (BlackBerry Messenger), tak hanya melalui media sosial kini mulai berpindah ke media elektronik yang tidak hanya ber kirim pesan tetapi juga ada video. Meski dari awal sudah terdengar mencurigakan kabar itu, masih banyak saja yang kerap tertipu berita bohong (*hoax*) di dunia maya (internet). Ironisnya, walaupun terdengar sepele, berita bohong (*hoax*) dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat sebagai pengguna internet (*nitizen*).⁴⁵

5. Cara Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

Komunitas Anti Hoax yang membentuk Turn Back Hoax menerangkan beberapa cara kerja penyebaran berita bohong (*hoax*) di antaranya:⁴⁶

⁴³Dictionary.cambridge,<http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hoax#translation>, diakses tanggal 03 Desember 2020

⁴⁴ Dedi Rianto Rahadi, *Perilaku Pengguna...., Op., Cit.*, hlm. 61

⁴⁵ Bramy Biantoro, *4 Bahaya mengintai dari kabar hoax di dunia maya*,<https://www.merdeka.com/teknologi/4-bahaya-mengintai-dari-kabar-hoax-di-duniamaya/hoax-buang-buang-waktu-dan-uang.html> diakses terakhir tanggal 04 Desember 2020, jam 19.12

⁴⁶ Yeha Regina Citra Mahardika, *Op.Cit.*, hlm. 29

- a) Berita bohong (*hoax*) berawal dari rasa kebencian oknum tertentu terhadap tokoh/etnis/instansi, yang selanjutnya dilegitimasi kebenaran isi beritanya dengan menciptakan kebenaran baru sesuai kemauannya
- b) Melalui akun buzzer, berita bohong (*hoax*) menyebarkan provokasi melalui penggunaan hastag dan permainan akun bot.
- c) Selanjutnya diterima oleh konsumen berita yang cenderung sukarela dalam menyukai (*like*) dan membagikan (*share*) berita tersebut berdasarkan kepentingan masing-masing atau dikarenakan sebuah kebencian terhadap pihak lain sehingga terkesan bersaing.

Akun tersebut mendapatkan banyak pengikut (*follower*) menguntungkan pihak marketing situs dan admin akun karena semakin banyak tawaran iklan yang masuk, berita bohong (*hoax*) pun menjadi viral.

6. Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Kasus Berita Bohong (*Hoax*)

Setelah mengetahui apa arti dari berita bohong (*hoax*), jenis – jenis, ciri – ciri, dan cara penyebaran berita bohong (*hoax*). Seperti yang kita ketahui juga berita bohong (*hoax*) adalah suatu bentuk perbuatan pidana di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), dimana suatu perbuatan pidana biasanya akan diproses awal melalui laporan yang di limpahkan kepada Polisi. Penulis akan memberikan sedikit penjelasan mengenai kepolisian yang dikenal sebagai aparat penegak hukum dan apa fungsi serta tugasnya.

Bidang – bidang hukum baru berkembang dimana yang sudah banyak memberikan perhatian pada suatu masalah atau kepentingan, semakin

banyak hasil pengaturan hukum berupa ketentuan – ketentuan atau kaidah – kaidah hukum, semakin cepat pula hukum ini menjadi suatu cabang atau bidang hukum yang berdiri sendiri. Salah satunya adalah bidang hukum baru, yaitu “Hukum Kepolisian” yang merupakan hukum yang mengatur segala hal tentang ikhwal Kepolisian.⁴⁷

Dinamika masyarakat yang berubah dengan cepat, diikuti dengan perubahan yang terjadi di bidang sosial, budaya, dan teknologi. Sementara di sisi lain perkembangan tingkat kesejahteraan juga semakin kompleks, yang menuntut peran Kepolisian untuk mengatasi berbagai pelanggaran hukum yang terjadi.⁴⁸ Polisi merupakan salah satu aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk memelihara keamanan dan juga ketertiban di suatu negara. Berdasarkan kewenangan tersebut, polisi dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang dicurigai telah melakukan suatu tindakan kejahatan berdasarkan bukti – bukti dan aturan hukum yang telah ditetapkan. Polisi juga diberi kewenangan untuk meminta keterangan kepada setiap warga masyarakat yang mengetahui jalannya suatu peristiwa dan kejadian suatu kejahatan untuk dijadikan sebagai saksi yang diperlukan dalam proses pemeriksaan guna mempermudah polisi untuk menetapkan jenis tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.⁴⁹

⁴⁷ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesi*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 2

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 4

⁴⁹ Ricky Irawan Sitepu, *Eksistensi Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah DIY dalam Penanggulangan Tindak Pidana yang Berbasis Teknologi Informasi*, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum

Dalam kehidupan bernegara, Polri merupakan alat negara yang berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan kenyamanan dalam negeri, sehingga dalam melaksanakan fungsi dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.⁵⁰ Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:⁵¹

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b) menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan:

- a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan,
- b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

dan program kekhususan Pradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 1 - 2

⁵⁰ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum, Op.cit*, hlm 15

⁵¹ Levina Jescelind V, *Macam – Macam dan Pengertian Polisi Beserta Tugasnya*, dalam <http://scdc.binus.ac.id/fopasbin/2017/07/macam-macam-dan-pengertian-polisi-beserta-tugasnya/>.

Diakses terakhir tanggal 18 Desember 2020, Pukul 16.29 WIB

- c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
- e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum,
- f) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa
- g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya
- h) menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian

- l) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar dalam pelaksanaan tugas – tugas kepolisian seperti yang disebutkan di atas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-Undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain:⁵²

- a) menerima laporan dan/atau pengaduan,
- b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit atau keresahan dalam masyarakat
- d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang dan mencari keterangan dan barang bukti

⁵²*Ibid*

- i) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- j) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- k) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
- l) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi mempunyai tugas pokok yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut polisi harus siap untuk menghadapi segala bentuk tindak kejahatan yang dapat mengancam keamanan serta ketertiban di tengah – tengah masyarakat. Bentuk kejahatan yang dihadapi polisi bukan kejahatan konvensional saja, tetapi bentuk kejahatan baru yang belakangan ini banyak muncul yaitu kejahatan yang dilakukan di dunia maya atau internet, yang mana karena adanya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).⁵³

Teknologi informasi membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme kini dapat dilakukan dengan mudah. Jenis kejahatan tersebut dapat dilakukan

⁵³ Ricky Irawan Sitepu, *Op., Cit.*, hlm.

secara *online* oleh individu maupun kelompok dengan resiko tertangkap yang sangat kecil dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara.⁵⁴

Kejahatan di bidang teknologi informasi merupakan kejahatan yang tidak mudah dalam pengungkapannya. Dalam kejahatan tersebut pelaku dapat dengan mudah mengubah segala sesuatu yang berhubungan dengan diri pelakunya, seperti identitas dan alamat, belum lagi jika suatu yang viral seperti video kabar bohong (*hoax*) susah untuk melacak pelaku penyebarannya. Hal ini terbukti dari banyaknya pelaku kejahatan di bidang teknologi informasi yang tidak tertangkap dan kembali mengulangi perbuatannya.⁵⁵

Sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang diberi wewenang oleh undang-undang polisi harus siap menghadapi jenis kejahatan di bidang teknologi informasi yang saat ini sedang banyak muncul di Indonesia. Polisi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa kejahatan di bidang teknologi informasi. Pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan

⁵⁴ Petrus Reinhard Golose, Makalah pada Seminar Nasional yang diselenggarakan di Menara Sjafruddin Prawiranegara Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, tentang *Perkembangan Cybercrime Dan Upaya Penanganannya Di Indonesia Oleh Polri*, Jakarta, 10 Desember 2006, hlm. 2

⁵⁵ Ricky Irawan Sitepu, *Op., Cit.*, hlm.

bahwa penyidikan terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana.

Menurut Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁵⁶

Dikarenakan polisi adalah Aparat Negara yang memiliki wewenang dan tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan di dalam sebuah kasus maka, kasus berita bohong (*hoax*) telur palsu yang mana viral melalui video di media elektronik yang melibatkan Syahroni Daud di dalam video itu polisi memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus itu. Namun di dalam kasus ini bukanlah polisi biasa melainkan polisi yang bergerak di bidang *Cyber Crime* untuk menyelidiki kasus video berita bohong (*hoax*) telur palsu yaitu Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Mengapa Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, Penulis akan membahas tentang awal mula, tugas dan wewenang dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan unit *cybercrime* yang ada di POLDA setiap daerah di Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya penanggulangan dan penanganan terhadap kejahatan di bidang teknologi informasi. Upaya awal yang telah dilakukan seperti

³³*Ibid*, hlm. 4

melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan teknologi informasi, teknologi komputer, teknologi komunikasi, teknologi elektronika, dan teknologi penyiaran serta penyelenggaraan fungsi laboratorium komputer forensik dalam rangka memberikan dukungan teknis proses penyidikan kejahatan dunia maya. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana teknologi informasi tersebut ditangani oleh satu unit khusus di Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) MABES POLRI yaitu Direktorat II Ekonomi dan Khusus Unit V IT dan *cyber crime* dan terdapat unit penanggulangan *cyber crime* di beberapa Kepolisian Daerah (Polda).⁵⁷

Pada bulan Februari 2017 Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) MABES POLRI yaitu Direktorat II Ekonomi dan Khusus Unit V IT dan *cyber crime* berubah menjadi Direktorat yang berdiri sendiri untuk *cyber crime* yaitu Direktorat Siber Crime Bareskrim Polri, dimana faktor utama yang mempengaruhi perubahan itu adalah banyak berita – berita bohong (*hoax*) yang berkembang di Indonesia.

Menurut Kabagpenum Polri Kombes Martinus Sitompul, bila sebelumnya Cyber Crime di bawah Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, saat ini akan menjadi direktorat tersendiri, yakni Direktorat Cyber Crime langsung di bawah Bareskrim Polri. Pembentukan Subdit menjadi direktorat ini untuk mengembangkan organisasi. Apalagi saat ini kabar bohong alias *hoax*

⁵⁷*Ibid*, hlm. 5

yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan bebas menyebar di masyarakat dan membuat resah masyarakat.⁵⁸

B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana, konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* berdasar pada suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidanakan seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).⁵⁹

Liability atau pertanggungjawaban bisa dilihat dari segi falsafah hukumnya. Seorang filsafah dalam bidang hukum pada abad ke – 20 yaitu Roscou Pound menjelaskan bahwa *liability* atau pertanggungjawaban sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima oleh pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”.⁶⁰

Konsep dari “*liability*” diartikan sebagai “*reparation*”, sehingga terjadilah sebuah perubahan dari arti konsep “*liability*”, dari “*compostion*

⁵⁸ Petrus Reinhard Golose..., Op.Cit., hlm.45

⁵⁹ Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum*, Volume. 6, Nomor. 11 Tahun 1999, hlm. 27

⁶⁰ Romli Atmasasmita, *Asas – Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hlm. 79

for vengeance” menjadi *“reparation for injury”*. Perubahan bentuk ganti rugi berupa uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman secara historis merupakan awal dari *“liability”* atau “pertanggungjawaban”.⁶¹

Berdasarkan uraian di atas, telah dijelaskan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut soal hukum semata, tetapi juga menyangkut soal nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat. Perkembangan masyarakat yang disertai dengan perkembangan teknologi pada abad ke-20 berkembang dengan pesat. Oleh karena itu timbullah perkembangan pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai – nilai kesusilaan umum. Namun inti dari nilai kesusilaan umum tetap tidak berubah, terutama terhadap perbuatan – perbuatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa dan pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa dan badan serta harta benda.⁶²

Roeslan Saleh mengatakan bahwa, petanggung jawab dan pidana adalah suatu ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari – hari baik itu dalam moral, agama, dan hukum.⁶³ Ketiga unsur tersebut berkaitan satu sama lain dan bertumpu dalam satu keadaan yang sama, yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan – aturan. Sistem aturan ini dapat bersifat luas dan beragam, meliputi hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya. Persamaan dari

⁶¹*Ibid*

⁶² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 17

⁶³ Roeslan Saleh, *Perbuatan...*, *Op.Cit.*, hlm. 33

ketiga sistem aturan tersebut yaitu bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh setiap kelompok tertentu. Jadi, sistem aturan tersebut merupakan sistem yang melahirkan konsep kesalahan pertanggungjawaban dan pembedaan itu adalah sistem yang normatif.⁶⁴

Roeslan Saleh memberikan jawaban bahwa bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana yaitu yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatannya.⁶⁵ Secara teoritik, perbincangan mengenai pertanggungjawaban pidana pasti didahului oleh ulasan tentang perbuatan pidana sekalipun dua hal tersebut berbeda baik secara konseptual maupun penerapannya dalam praktek penegakan hukum. Di dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancam perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan.⁶⁶

Konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini didasarkan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika

⁶⁴*Ibid*

⁶⁵*Ibid*

⁶⁶*Ibid*

pikiran orang itu jahat.⁶⁷ Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).⁶⁸

2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan pidana yang dilakukannya.⁶⁹

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana artinya, berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Hukum pidana memisahkan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukan.

Goerge P. Fletcher menyatakan:⁷⁰

“Orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ataukah tidak. Sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana, sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan.”

⁶⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali., *Op.Cit.*, hlm. 20

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Amir Ilyas, *Loc. Cit*

⁷⁰ George P. Fletcher, *Rethinking Criminal Law*, Oxford University Press, 2000, hlm. 455

⁶⁷Eddy O.S Hiarij, *Op.Cit.*, hlm.121

Berbeda dengan Goerge P. Fletcher, van Hamel tidak memberikan definisi pertanggungjawaban pidana, melainkan memberi pengertian mengenai pertanggungjawaban.

Van Hamel menyatakan:⁶⁷

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, antara lain:

“ 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh – sungguh dari perbuatan – perbuatan itu sendiri; 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan – perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat. “

Simons memberikan definisi mengenai pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan ada hubungannya antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.⁷¹

Definisi Simons mengenai pertanggungjawaban pidana dapat diambil kesimpulan bahwa inti pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah:

- 1) keadaan psikis atau jiwa seseorang; dan
- 2) hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan.

Menurut bahasa Belanda pertanggungjawaban dalam konteks keadaan psikis diterjemahkan menjadi *toerekeningsvatbaarheid* atau dapat

⁷¹ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm.122

dimintai pertanggungjawaban atau kemampuan bertanggung jawab, sedangkan dalam konteks hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan, diterjemahkan menjadi *toerekenbaarheid* atau pertanggungjawaban.⁷²

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif yang terdapat pada perbuatan pidana secara subyektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku adalah asas kesalahan, artinya bahwa pelaku perbuatan pidana hanya akan dipidana jika mempunyai kesalahan di dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, maka orang itu dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁷³

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidanakan seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Maka dari itu tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal adanya asas “tidak ada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana.⁷⁴

⁷² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliyah bagian Dua*, Balai Lektor Mahasiswa, 1998, hlm. 243

⁷³ Roeslan Saleh, *Perbuatan..., Op.Cit.*, hlm. 75

⁷⁴ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 157

3. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang di dalam membedakan hal baik dan buruk.⁷⁵ Dapat dikatakan juga mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.⁷⁶

Mengenai kemampuan bertanggung jawab selalu dikaitkan dengan keadaan jiwa si pelaku perbuatan pidana, sehingga keadaan jiwa itu harus sedemikian rupa sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebagai unsur yang bersifat subyektif ini di dalam KUHP tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab. Akan tetapi, KUHP hanya memberikan syarat – syarat bagaimana keadaan jiwa seseorang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana dijabarkan Pasal 44 KUHP, yang berbunyi:⁷⁷

- “ 1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat, dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana,
2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungungkan kepada pelaku karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kerumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. “

Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung,

Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

⁷⁵ M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm. 129

⁷⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan..Op.Cit.*, hlm. 80

⁷⁷ Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 191

Melihat ketentuan Pasal 44 KUHP dapat ditarik kesimpulan yaitu:⁷⁸

- a. Kemampuan bertanggung jawab dilihat dari sisi si pelaku berupa keadaan akal atau jiwanya yang cacat pertumbuhan atau terganggu karena suatu penyakit. Contohnya orang idiot yang melakukan suatu perbuatan pidana.
- b. Penentuan kemampuan bertanggung jawab dalam konteks yang pertama harus dilakukan oleh seorang psikiater atau dokter di bidang ahli kejiwaan.
- c. Ada hubungan yang utama antara keadaan jiwa dan perbuatan yang telah dilakukan.
- d. Penilaian terhadap hubungan tersebut merupakan otoritas hakim yang sedang mengadili perkara.
- e. Sistem yang dipakai dalam KUHP adalah diskriptif normatif karena di satu sisi, menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, namun di sisi lain secara normatif hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.

Dalam Konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2007 kemampuan bertanggung jawab bukan hanya dua hal saja sebagaimana dalam KUHP, tetapi diperluas ruang lingkupnya pada Pasal 40 KUHP yang berbunyi:⁷⁹

“Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan.”

Konsep Pasal 40 KUHP di atas menentukan bahwa seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana ditandai oleh adanya gangguan jiwa, penyakit jiwa, dan retardasi mental. Chairul

⁷⁸ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 129

⁷⁹ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 173

Huda mengatakan bahwa tidak jelas betul batas antara tidak dan kurang dapat dipertanggungjawabkan itu. Kapan suatu gangguan jiwa, penyakit jiwa, dan retardasi mental mengakibatkan pembuatnya tidak dapat atau kurang dapat dipertanggungjawabkan tidak dengan mudah menentukannya. Padahal konsekuensinya sangat bertolak belakang.⁸⁰

Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Artinya adalah ketika ditemukan tanda seseorang tidak mampu bertanggung jawab dan karenanya dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawabannya tidak dilanjutkan. Orang tersebut dapat dikenakan tindakan, tetapi orang tersebut tidak dapat dikenakan pidana. Tidak pula perlu diperiksa apakah ada salah satu bentuk kesalahan dan alasan penghapus kesalahan dalam dirinya. Sedangkan kurang dapat dipertanggungjawabkan hanya berakibat pengurangan pidana, tetapi tidak dimaksudkan untuk menghapuskan pidana.⁸¹

4. Unsur – Unsur Perbuatan Pidana

Setelah mengetahui dari uraian di atas bahwa unsur – unsur perbuatan pidana adalah unsur – unsur yang terdapat dalam pengertian perbuatan yang dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana.⁸² Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan

⁸⁰ Chairul Huda, *Op.Cit.*, hlm 96

⁸¹ *Ibid*, hlm. 97

⁸² *Ibid*. hlm. 100

diancam dengan pidana bagi yang melakukannya, maka unsur – unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal:⁸³

1. Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.
2. Kelakuan dan akibat timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertian formil maupun materiil.
3. Adanya hal – hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda – beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada di dalam undang-undang.

Dalam hal yang ketiga ini berkaitan dengan beberapa hal misalnya berkaitan dengan diri pelaku perbuatan pidana, tempat terjadinya perbuatan pidana, keadaan sebagai syarat tambahan bagi pembedaan, serta keadaan yang memberatkan pidana. Misalnya yang berkaitan dengan syarat tambahan bahwa untuk bisa disebut telah terjadi perbuatan pidana yang pelakunya dapat dikenai sanksi pidana, pelaku tersebut harus berbuat secara sengaja.⁸⁴

Pasal 304 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

⁸³*Ibid*

⁸⁴*Ibid*

Menurut Moeljatno unsur – unsur yang perlu ada untuk memenuhi syarat adanya suatu perbuatan (dalam arti luas) dalam arti hukum pidana, atau untuk adanya perbuatan pidana, yaitu:⁸⁵

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan). Mengenai unsur ini bahwa hakikatnya tiap – tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur – unsur lahir, oleh karena perbuatannya, yang mengandung kelakuan serta akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. Moeljatno menulis hal ikhwal dimana oleh van Hamel dibagi menjadi dua golongan, yaitu mengenai orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Contohnya ada di dalam pasal 164 dan 165 yaitu kewajiban untuk melapor kepada yang berwajib jika mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Hal ini kemudian terjadinya kejahatan itu merupakan unsur tambahan.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif. Contohnya ada pada Pasal 167, bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk memaksa masuk karena bukan pejabat kepolisian atau kejaksaan.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif. Adakalanya sifat melawan hukumnya perbuatan yang tidak terletak pada keadaan objektif, tetapi pada keadaan subjektif, yaitu terletak dalam hati sanubari

⁸⁵ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm.87 - 89

terdakwa sendiri. Dari uraian melawan hukum yang subjektif menunjukkan bahwa unsur perbuatan tidak dapat dilepaskan secara mutlak dari unsur pertanggungjawaban pidana (kesalahan) walaupun keduanya dibedakan.

5. Jenis – Jenis Perbuatan Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana. Perbuatan pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan serta pelanggaran. Kejahatan (*rechtdelicten*), adalah perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan keadilan terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak diatur di dalam undang-undang tetapi dimata masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.⁸⁶ Berbeda halnya dengan kejahatan pelanggaran adalah perbuatan – perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.⁸⁷

Perbuatan pidana juga dibedakan menjadi dua yaitu, perbuatan formil dan perbuatan pidana materil. Perbedaan perbuatan pidana ke dalam bentuk formil dan perbuatan pidana dalam bentuk materil tidak terlepas dari makna yang terkandung dari istilah “perbuatan” itu sendiri. Bahwa dalam istilah “perbuatan” mengandung dua hal yaitu kelakuan atau tindakan dan akibat, untuk lebih mudah dipahami dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana formil adalah perbuatan yang menitikberatkan

⁸⁶ Tongat, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonsia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 117 - 118

⁸⁷ *Ibid*

pada tindakan, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menitikberatkan pada akibat.⁸⁸

Selain perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materil terdapat beberapa jenis perbuatan pidana antara lain adalah:⁸⁹

- a. Perbuatan pidana atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*omission act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, contohnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah contohnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan seperti pada Pasal 522 KUHP
- b. Perbuatan pidana dapat dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (*delik dolus*) dan kealpaan (*delik culpa*). Delik *dolus* adalah delik yang di dalamnya terdapat unsur kesengajaan. Sedangkan delik *culpa* adalah delik – delik yang di dalamnya memuat unsur kealpaan.
- c. Perbuatan pidana tunggal dan perbuatan pidana berganda. Perbuatan pidana tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Sedangkan perbuatan pidana berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.
- d. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus dan perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Perbuatan pidana yang

⁸⁸ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 103

⁸⁹ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm.101 – 103

berlangsung terus menerus maksudnya adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus menerus. Perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus maksudnya adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus misalnya pencurian dan pembunuhan. Contoh dari perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus adalah delik merampas kemerdekaan orang dalam Pasal 333 KUHP.

- e. Perbuatan pidana delik aduan dan delik biasa. Delik aduan yaitu perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik biasa yaitu delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutnya, seperti pembunuhan, pencurian, dan penggelapan.
- f. Perbuatan pidana delik biasa dan delik yang dikualifikasi. Delik biasa yaitu perbuatan pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan. Delik dikualifikasi yaitu perbuatan pidana dalam bentuk pokok dan tambahan dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat.

6. Subjek Perbuatan Pidana

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Akibatnya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik di dalam KUHP yang dimulai dengan kata – kata “barang siapa”. Kata

“barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.⁹⁰

Seiring dengan perkembangannya, saat ini ada usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat pada korporasi sebagaimana dianggap layaknya orang (manusia). Usaha tersebut dilatar belakangi oleh fakta bahwa tidak jarang korporasi mendapat keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya. Begitu juga dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh tindakan – tindakan pengurus – pengurus korporasi. Oleh karena itu, dianggap tidak adil jika suatu korporasi tidak dikenakan hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Dari pemikiran itulah yang kemudian memunculkan tahap – tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana.⁹¹

7. Kesalahan

Dalam hukum pidana banyak teori yang membicarakan masalah kesalahan, ada teori yang mengajarkan kesalahan tersebut sebagai unsur yang mutlak dari perbuatan pidana dan ada pula teori yang mengajarkan kesalahan sebagai bagian dari pertanggungjawaban.⁹² Kesalahan timbul

⁹⁰ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 111

⁹¹ *Ibid*

⁹² Roni Wiyanto, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 180

karena ada dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.⁹³

Kata kesalahan sebagai bagian dari hukum pidana digunakan sebagai terjemahan itu dianggap kurang tepat, karena kata kesalahan dapat diartikan sebagai *fout*. Menurut Satochid Kartanegara, tidak ada kata yang tepat untuk menerjemahkan istilah *schuld*, tetapi perkataan kesalahan merupakan perkataan yang paling mendekati untuk menjelaskan istilah *schuld*.

Kesalahan yaitu dapat dicelanya pelaku perbuatan pidana karena dilihat dari sisi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat yang lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.⁹⁴ Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari sisi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu alasan melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal orang tersebut mampu mengetahui makna perbuatannya, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan yang demikian.⁹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengertian kesalahan secara psikologis berpacu pada keadaan batin (*psyscis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga si pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas

⁹³ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 77

⁹⁴ Roeslan Saleh, "Perbuatan...", *Op.Cit.*, hlm. 77

⁹⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana...*, *Op.Cit.*, hlm. 169

perbuatannya,⁹⁶ tidak diikuti karena menimbulkan masalah dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan perbuatan pidana. Dalam KUHP yang berlaku saat ini, perbuatan pidana pelanggaran tidak memuat unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan”.⁹⁷

Praktik hukum sempat diliputi dengan pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam pelanggaran, menyebabkan pelakunya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari dua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keraguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.⁹⁸

Beberapa pandangan para ahli tentang pengertian dan ruang lingkup kesalahan di bidang hukum pidana:⁹⁹

a. Simons

Unsur – unsur kesalahan dalam hukum pidana menurut Simons dikaitkan dengan *toerekeningsvatbaarheid*. Oleh karena itu, perlu diingatkan kembali mengenai unsur – unsur perbuatan pidana yang dirumuskan Simons, sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (perbuatan yang dilakukan oleh manusia)

⁹⁶ Tongat, *Op.Cit.*, hlm. 222

⁹⁷ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 158

⁹⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 73

⁹⁹ *Op.Cit.*, hlm. 181

- 2) Perbuatan itu karena dikehendaki (*gewild*) atau tanpa keinsyafan (*bewust*) atau penyesalan
- 3) Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtlijk*)
- 4) Seseorang yang melakukan perbuatan itu harus *toerekeningsvatbaarheid* (dapat dipertanggungjawabkan).

Toerekeningsvatbaarheid ini yang ada hubungannya dengan kesalahan. Menurut Simons yang disebut dengan kesalahan adalah seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang dihubungkan dengan kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu orang yang melakukannya dapat dijatuhi pidana.

b. Pompe

Menurut Pompe kesalahan itu merupakan bagian dari kehendak pelaku dan harus dipisahkan dari perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Kedua unsur tersebut merupakan unsur kesalahan yang menimbulkan akibat dapat dipidananya si pelaku. Syarat untuk seseorang dianggap mempunyai kesalahan menurut Pompe ada tiga syarat, yaitu:

- 1) Perbuatan yang bersifat melawan hukum
- 2) *Dolus* atau *Culpa*
- 3) Kemampuan bertanggung jawab

Perbuatan yang bersifat melawan juga merupakan unsur dari kesalahan sehingga pelaku itu dapat dijatuhi hukuman pidana.

c. Moeljatno

Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku perbuatan pidana itu mampu bertanggung jawab, bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:¹⁰⁰

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- 2) Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*);
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf

Dilihat dari bentuknya, kesalahan dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*):

a. Kesengajaan

Sengaja atau kesengajaan adalah unsur kedua yang bersifat subyektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. Istilah lain dari kata kesengajaan adalah *opzet*, di dalam KUHP juga tidak dijelaskan secara terperinci mengenai apa itu yang dimaksud dengan *opzet*.¹⁰¹

Kebanyakan perbuatan pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Biasanya yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini

¹⁰⁰ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm. 164

¹⁰¹ Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 201

harus mengenai ketiga unsur perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok – pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.¹⁰²¹⁰³

Sengaja atau kesengajaan secara teoritis dibagi menjadi dua bentuk kesengajaan (*dolus*), yaitu *dolus malus* dan *dolus eventualis*. *Dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*).¹⁰⁴ Teori pengetahuan adalah bahwa manusia tidak dapat menghendaki suatu akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan, tetapi manusia hanya dapat memperkirakan atau membayangkan suatu akibat dari yang telah diperkirakan oleh pelaku, sehingga perbuatan yang dilakukan pelaku terlebih dahulu memperkiraan suatu akibat tertentu.¹⁰⁵

Teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) menitik beratkan pada apa yang dikehendaki atau dibayangkan oleh pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana.¹⁰⁶ Sedangkan teori kehendak (*wilstheorie*) adalah kesengajaan merupakan kehendak melakukan suatu perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, maksudnya adalah akibat yang ditimbulkan merupakan kehendak dilakukannya

¹⁰² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, PT. Eresco, 1962, hlm. 61

¹⁰⁴ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 175

¹⁰⁵ *Op.Cit.*, hlm. 203

¹⁰⁶ Sudarto, *Diktat Hukum Pidana Jilid A-B*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1975, hlm. 16

suatau perbuatan tertentu atau perbuatan itu dilakukan bertujuan menimbulkan suatu akibat tertentu.¹⁰⁷

Dolus eventualis yaitu sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan kemungkinan karena pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang telah dikehendaki. Jika kemungkinan yang ia sadari itu, kemudian menjadi kenyataan terhadap kenyataan tersebut ia katakan mempunyai suatu kesengajaan.¹⁰⁸

Van Bemmelen mengatakan bahwa yang dinamakan *dolus eventualis* yaitu kesengajaan bersyarat yang bertolak dari kemungkinan, dalam arti tidak pernah lebih banyak dikehendaki kemungkinan matinya seseorang itu misalnya. Seseorang yang menghendaki kemungkinan matinya seseorang, tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki orang itu mati. Tetapi, jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sadar bahwa perbuatannya mengakibatkan matinya seseorang, hal itu menunjukkan bahwa ia memang menghendaki kematian orang itu.¹⁰⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku perbuatan pidana menyadari bahwa perbuatannya itu sangat

¹⁰⁷ Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 202 – 203

¹⁰⁸ Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.

¹⁰⁹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 18

mungkin akan menimbulkan terjadinya akibat tertentu yang dilarang hukum. Namun meskipun pelaku menyadari hal itu, sikap yang muncul pada dirinya bukannya menjauhi perbuatan itu, namun tetap melakukannya dengan berpandangan bahwa walaupun akibat tertentu yang dilarang hukum akan terjadi, ya apa boleh buat. Dalam hubungan inilah, *dolus eventualis* juga disebut dengan *inklauf nehmen theory* atau teori apa boleh buat.¹¹⁰

b. Kealpaan (*culpa*)

Selain sengaja atau kesengajaan, bentuk kesalahan lainnya adalah kealpaan (*culpa*) akibat ini timbul karena seseorang alpa, semberono, teledor, lalai, kurang hati – hati atau kurang penduga – duga. Perbedaannya dengan sengaja atau kesengajaan ialah bahwa ancaman pidana pada delik – delik kesengajaan lebih berat bila dibandingkan dengan delik kealpaan (*culpa*). Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada sengaja atau kesengajaan, tetapi tidak berarti bahwa kealpaan adalah kesenjangan yang ringan.¹¹¹

KUHP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kealpaan (*culpa*), sehingga secara formal tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan.¹¹² Simons mengatakan bahwa umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati – hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga

¹¹⁰ Tongat, *Op.Cit.*, hlm. 247

¹¹¹ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit.*, hlm.149

¹¹² Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 177

akibatnya. Namun meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati – hati, masih memungkinkan juga terjadi kealpaan yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang. Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibat dari perbuatannya. Diduganya akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan.¹¹³

Kealpaan menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu:¹¹⁴

- 1) Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP.
- 2) Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana jika akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.

Kealpaan itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu:¹¹⁵

- 1) Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis dan tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah

¹¹³ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 25

¹¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.54.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 56

melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum.

- 2) Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan teledor.
- 3) Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

Berdasarkan penjelasan tentang kealpaan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dikatakan kealpaan (*culpa*) jika keadaan batin pelaku perbuatan pidana bersifat ceroboh, teledor, atau kurang hati – hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi. Jadi dalam kealpaan ini, pada diri pelaku sama sekali memang tidak ada niat kesenjangan sedikit pun untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang dilarang hukum. Meskipun demikian, ia tetap patut dipersalahkan atas terjadinya perbuatan dan akibat yang dilarang hukum karena sikapnya yang kurang hati – hati tersebut. Hal ini dikarenakan nilai – nilai kepatutan yang ada dalam kehidupan masyarakat mengharuskan agar setiap orang memiliki sikap berhati – hati dalam bertindak.¹¹⁶

8. Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Hubungan pelaku dengan perbuatan pidananya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari pelaku. Ia menginsyafi hakekat dari perbuatan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya perbuatan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan perbuatan itu,

¹¹⁶ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 178

maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali.¹¹⁷

Roeslan Saleh mengatakan bahwa: Tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).¹¹⁸

Ilmu hukum pidana alasan penghapus pidana dibagi menjadi dua yaitu: pertama, penghapus pidana umum, yang berlaku kepada semua rumusan delik yang disebut dalam Pasal 44, 48 – 51 KUHP, kedua adalah alasan penghapus pidana khusus yang terdapat dalam pasal – pasal tertentu saja, yaitu Pasal 122, 221 ayat (2), 261, 310 dan 367 ayat (1) KUHP.¹⁰⁶ Dalam doktrin hukum pidana dibedakan antara alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau dikenal dengan alasan pembenar dan alasan penghapus kesalahan atau dikenal dengan alasan pemaaf.¹¹⁹

Dibedakannya antara alasan pembenar dari alasan pemaaf karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Adanya alasan pembenar berujung pada “pembenaran” atas perbuatan pidana yang sepintas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf betumpu pada

¹¹⁷ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 86 - 87

¹¹⁸ Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, 2002, Jakarta, hlm. 25 ¹⁰⁶Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 88

¹¹⁹ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 181

“pemaafan” pembuatannya sekalipun telah melakukan perbuatan pidana yang melawan hukum.¹²⁰

Dalam hukum pidana yang termasuk ke dalam kategori alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf antara lain adalah:

a. Daya Paksa (*Overmacht*)

Merupakan daya paksa (*vis compulsive*) seperti keadaan darurat. Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP. Dalam KUHP tidak memberikan pengertian daya paksa secara konkrit. Dalam *memorie van toelichting* (MvT) daya paksa diumpamakan sebagai kekuatan, setiap daya paksa orang berada dalam *dwangpositie* (posisi terjepit). Daya paksa ini merupakan daya paksa psikis yang berasal dari luar dari si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya.¹²¹

b. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer exces*)

Merupakan dilampauinya batas – batas dari suatu pembelaan seperlunya itu haruslah disebabkan karena pengaruh dari suatu kegoncangan jiwa yang demikian hebat, yang bukan semata – mata disebabkan karena adanya perasaan takut atau ketidaktahuan tentang apa yang harus dilakukan, melainkan juga disebabkan oleh hal – hal lain seperti kemarahan atau perasaan kasihan.¹²² Artinya pembelaan terpaksa yang melampaui batas adalah perbuatan pidana yang dilakukan sebagai pembelaan pada keadaan seseorang mengalami suatu serangan atau ancaman serangan dapat membebaskan pelakunya dari ancaman jika sifat

¹²⁰ Chairul Huda, *Op.Cit.*, hlm.121

¹²¹ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 88 - 89

¹²² Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 475

pembelaan tersebut sebanding dengan bobot serangan atau ancaman serangan itu sendiri.¹²³ Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer exces*) diatur di dalam KUHP Pasal 49 ayat (2).

c. Menjalankan Perintah Jabatan yang Tidak Sah, Tetapi Terdakwa Mengira Perintah Itu Sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP

Perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang berwenang. Pelaku dapat dimaafkan jika pelaku melaksanakan perintah tersebut dengan itikad baik, mengira bahwa perintah tersebut sah dan masih berada dalam lingkungan pekerjaannya. Hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP. Menurut Vos, mengenai ketentuan ayat (2) Pasal 51 KUHP itu, perintah jabatan yang diberikan oleh yang tidak berwenang untuk lolos dari pemidanaan, harus memenuhi dua syarat:

Syarat subyektif, yakni pembuat harus dengan itikad baik memandang bahwa perintah itu datang dari yang berwenang; dan Syarat obyektif, yakni pelaksanaan perintah harus terletak dalam ruang lingkup pembuat sebagai bawahan.¹²⁴

C. Definisi Operasional

Merupakan landasan teoritis dalam menganalisa pokok permasalahan, beberapa definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹²³ M. Abdul Kholiq, *Op.Cit.*, hlm. 156

¹²⁴ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 90 – 91

1. Berita bohong (*hoax*): *Hoax* adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya. Definisi lain menyatakan *hoax* adalah suatu tipuan yang digunakan untuk mempercayai sesuatu yang salah dan seringkali tidak masuk akal yang melalui media online.¹²⁵
2. Tindak Pidana: *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹²⁶
3. Pertanggungjawaban Pidana: Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan

¹²⁵ Dedi Rianto Rahadi, *Op.Cit.*, hlm. 61

¹²⁶ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 69

maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukannya.¹²⁷

4. Media Elektronik: Sarana media massa yang menggunakan alat – alat elektronik modern, misalnya radio, televisi, dan film.¹²⁸

Media elektronik adalah semua alat media yang menggunakan energi elektromekanis, baik pengguna akhir atau penonton dalam mengakses konten. Hal ini berbeda dengan media cetak, yang tidak membutuhkan energi elektromagnetis untuk diakses oleh pengguna akhir dalam bentuk cetak. Sumber media elektronik yang paling umum digunakan oleh masyarakat adalah: rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, presentasi slide, CD-ROM dan konten online (misalnya Youtube).¹²⁹

¹²⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*, Rangkap Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 73

¹²⁸ Departemen Pendidikan Nasional
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/media%20elektronik> diakses terakhir tanggal 17 Mei 2020, jam 14.00

¹²⁹ Anonym, <https://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2DOC/2011-2-01191MC%20Bab2001.doc> diakses terakhir tanggal 17 Mei 2020, jam 14.00

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Cara Kerja *Buzzer* dalam Penyampaian Informasi di Media Sosial

Riset The Internet Institute University of Oxford pada tahun 2019 telah menunjukkan peningkatan jumlah upaya manipulasi media sosial yang terorganisasi mencapai 150 persen dalam dua tahun terakhir dengan perolehan data pada tahun 2017 telah mencapai 28 negara, pada tahun 2018 terjadi pada 48 Negara, dan 2019 mencapai 70 Negara yang marak akan upaya manipulasi media sosial dengan memperhitungkan peningkatan penggunaan internet pada setiap negara.

Indonesia merupakan negara yang berkembang dalam hal teknologi, penggunaan *Buzzer* oleh orang-orang tertentu dalam menjatuhkan dan mencari tahu privasi seseorang dengan melakukan peretasan didalamnya, cara kerja *Buzzer* dalam melakukan aksinya dalam memanipulasi media sosial dengan menyebarkan berita-berita hoax dalam penyampaian informasi di media social.

Praktik *buzzer* dalam menyampaikan informasi di media sosial selalu saja terbebas dari tindak pidana, banyak kasus *buzzer* yang dilaporkan oleh kalangan masyarakat tetapi polisi tetap saja tidak dapat melakukan indikasi adanya kejahatan, karena cara kerja *Buzzer* yang menggunakan berbagai cara agar tidak menjadi seorang subjek hukum. Adapun *buzzer* melakukan kerjanya :

- a. Bergabung dengan Kelompok Anonymous

Anonymous merupakan sebuah kelompok *hacker* atau peretas paling berpengaruh di dunia maya. Istilah Anonymous muncul pertama pada tahun 2003 dengan tujuan khusus yang menentang sensor dan pembatasan kebebasan melakukan kegiatan di internet terlebih pengawasan *online* yang dilakukan oleh pemerintah.

Kelompok ini sering disebut sebagai aktivis dunia maya yang berfungsi melakukan berbagai serangan siber. Tahun 2008 merupakan awal kebangkitan kelompok mereka karena Anonymous berhasil meretas situs web Church of Scientology. Adapun tujuan-tujuannya untuk mengungkap kejahatan yang tidak bisa diselesaikan oleh polisi. kelompok ini juga sering menghadapi tuntutan atas tindakannya. Kehadiran dan aksi-aksinya pun menjadi kontroversi di masyarakat baik yang pro dan yang kontra hingga saat ini.¹³⁰

Fakta-fakta menarik tentang Anonymous :¹³¹

1) Nama Anonymous

Terinspirasi oleh anonimitas *user* yang biasa memposting sesuatu di internet. Kebanyakan pengguna internet dalam menjelajah dunia maya lebih memilih tidak menyebutkan identitas aslinya.

¹³⁰<https://akurat.co/iptek/id-1139969-read-fakta-fakta-anonymous-kelompok-hacker-paling-berpengaruh-di-dunia-tertarik-gabung#:~:text=AKURAT.CO%2C%20Anonymous%20adalah%20kelompok,online%20yang%20dilakukan%20oleh%20pemerintah.>

¹³¹*Ibid*

2) Tidak punya pemimpin

Anonymous tidak memiliki struktur organisasi dan pemimpin. Sekelompok individu tanpa bentuk yang dapat melibatkan siapa saja yang ingin menggunakan merek tersebut.

3) Pemerintahan target utama

Anonymous kerap menyerang *website-website* penting untuk menyuarakan keprotesan dan ketidaksetujuan mereka terhadap sesuatu, tidak terkecuali pemerintahan suatu negara.

4) Anti dan sangat membenci terorisme

Kelompok ini sering melakukan operasi untuk mencegah dan melawan terorisme yang terjadi di seluruh dunia. Seperti salah satunya saat terjadi aksi terorisme di Paris, mereka segera melakukan operasi #OpISIS dan #OpParis.

5) Robin Hood Dunia Maya

Tindakannya tergolong ilegal dan melanggar hukum, Anonymous memiliki tempat tersendiri bagi mereka yang pro dan mendukung. Anonymous sering melakukan pembobolan terhadap rekening dari orang yang dicurigai tidak benar, seperti koruptor, pengemplang pajak, dan lainnya. Hasilnya pun didonasikan kepada beberapa organisasi amal.

Buzzer selalu bersembunyi dan bekerjasama dengan kelompok-kelompok anonymous untuk melakukan peretasan terhadap akun-akun media sosial untuk melakukan aksi-aksi mereka agar

berjalan lancar. Kehidupan buzzer tidak akan lengkap tanpa anonymous yang bisa mendapatkan data-data pribadi yang diperlukan oleh para buzzer agar perjalanannya lancar.

b. Pembuatan Akun Bot (komputer robot)

Akun bot (robot) di media sosial merupakan akun yang sengaja dibuat, deprogram dan dikelola oleh sebuah software yang bisa memerintah akun untuk melakukan komentar, follow, unfollow, like, dan sebagainya secara otomatis¹³² Bot berbahaya dapat mencuri kata kunci atau menginfeksi virus. Akun yang paling potensial terkena resiko kejahatan ini adalah akun yang terbuka untuk publik. Akun publik memiliki resiko diikuti oleh akun bot berbahaya yang bisa mengambil kata kunci atau mencuri foto.¹³³

Data The Information dari hasil riset Ghost Data baru-baru ini menunjukkan 95 juta atau 9,5% pengguna Instagram di seluruh dunia ialah bot. Jumlah itu meningkat jika dibandingkan dengan 2015 yang menunjukkan 7,9% akun bot di Instagram. Seperti yang diketahui aplikasi media sosial milik Facebook tersebut tercatat memiliki sekitar 1 juta pengguna seluruh dunia.¹³⁴

c. Menggunakan Akun Palsu (*Fake Account*)

Undang-undang ITE masih belum cukup mampu untuk menjerat pelaku kejahatan ujaran kebencian di internet yang dilakukan para

¹³²<https://lifestyle.bisnis.com/read/20201218/220/1332660/twitter-bakal-labeli-akun-bot-secara-otomatis-tahun-depan>

¹³³<https://www.marketeers.com/awas-ini-bahaya-di-follow-akun-instagram-palsu/>

¹³⁴<https://mediaindonesia.com/teknologi/180586/waspada-akun-bot-di-media-sosial>

buzzer. Modus kejahatan di bidang *cyber crime* tidak saja dilakukan dengan alat canggih, tetapi kejahatan ini benar-benar sulit untuk menentukan secara cepat dan sederhana siapa sebagai pelaku tindak pidananya ketika perangkat hukum dan penegak hukum pidana masih banyak memiliki keterbatasan.¹³⁵ Saat ini orang bisa dengan mudah membuat identitas email palsu di media sosial yang disebut dengan *Fake Account* atau Akun Palsu. Akun Palsu adalah orang-orang yang menulis, beropini, memanfaatkan media sosial dan beraktifitas didunia maya tanpa ingin diketahui identitas pribadinya oleh orang lain dengan menggunakan akun palsu, mereka merasa bebas dalam menulis, beropini, dan berkarya.¹³⁶ Namun banyak pihak yang menggunakan akun palsu tersebut sebagai sarana untuk menyebarkan kebencian terhadap orang lain, baik itu selebritis maupun orang biasa di media sosial salah satunya adalah di *instagram*. Keterdesakkan akan ketentuan baru yang mengatur tentang orang yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian menggunakan akun palsu sangat dibutuhkan. Karena perkembangan teknologi yang sudah semakin canggih dan menghasilkan perkembangan kejahatan yang semakin bervariasi pula. Demikian pemerintah harus mengikuti arus

¹³⁵Budi Suharyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukum nya, Jakarta, 2018, hlm. 73

¹³⁶Ari Kurnia, "Fenomena Akun Anonim Di Media Sosial Sebagai Sumber Informasi Dan Ekonomi (Analisis Wacana pada Akun Instagram Lambe Turah)", *Journal Communication Spectrum*, Vol. 4 No. 2 Februari – Juli, 2017, hlm. 155

perkembangan tersebut agar tetap menjaga keamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Instagram adalah media baru bagi seseorang yang ingin berbagi foto atau video secara bebas. Selain itu di *Instagram* orang juga bebas untuk mengunggah, membagikan, serta memberi “*like*”, memberikan komentar, atau mungkin cukup melihat saja foto-foto milik orang lain.¹³⁷ *Instagram* mempunyai arti sebagai media untuk membuat foto dan mengirimkannya dalam waktu yang sangat cepat. Tujuan tersebut sangat dimungkinkan oleh teknologi internet yang menjadi basis aktivitas media sosial ini. Bukan hanya itu, di *instagram* orang lain bisa memberikan komentar-komentar mereka tentang foto yang diunggah, baik itu berbentuk pujian maupun sindiran. Hal tersebut tak terpikir oleh orang-orang yang aktif di dunia maya bahwa keterbukaan yang mereka sampaikan dapat berakibat fatal dan berujung dengan tindak pidana maupun perdata. Misalnya, kasus penghinaan yang berujung pada pencemaran nama baik.¹³⁸ Sejatinya *instagram* tidak memperbolehkan penggunanya melakukan tindakan ilegal dan melanggar undang-undang seperti mengejek pengguna *instagram* lainnya.¹³⁹ Selain itu pembuatan atau penggunaan *instagram* harus menggunakan identitas yang jelas dan tidak dengan menggunakan akun palsu. Fenomena akun Palsu di *instagram* ini tentu sangat

¹³⁷Ester Krisnawati, “Mempertanyakan Privasi Di Era Selebgram: Masih Adakah”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 13 Nomor 2, Desember 2016, hlm. 181

¹³⁸*Ibid*

¹³⁹*Ibid*

meresahkan karena akun tersebut dikelola oleh orang yang tidak diketahui identitasnya serta sulit untuk dipertanggungjawabkan.¹⁴⁰

Sepanjang awal tahun 2019, *facebook* menghapus sebanyak 753,7 juta akun palsu di *platformnya* secara global, dan pada februari 2019 facebook menghapus akun palsu di Indonesia sebanyak 207 *page*, 800 akun palsu, 546 grup yang berkaitan dengan ujaran kebencian dan hoax serta 208 akun palsu di instagram dengan tujuan yang sama.¹⁴¹

Fenomena akun palsu di Indonesia sangat meresahkan masyarakat, baik itu masyarakat biasa maupun selebritis. Disamping sulit untuk melacak keberadaan orang dibalik akun palsu tersebut, peraturan yang spesifik mengenai akun palsu ini belum dipertegas oleh pemerintah. Direktorat *Cyber* Mabes Polri Brigjen Pol Fadil Imran mengungkapkan bahwa “Polisi sebenarnya tidak kesulitan untuk menemukan pemilik akun anonim. Namun, akan lebih baik jika sejak awal dibuat regulasi untuk meminimalisasi akun anonim yang ada.”¹⁴² Meskipun pemerintah sudah melakukan banyak upaya dalam mengatasi fenomena akun palsu salah satunya dengan mengeluarkan UndangUndang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi

¹⁴⁰Ari Kurnia, “Fenomena Akun Anonim Di Media Sosial Sebagai Sumber Informasi Dan Ekonomi (Analisis Wacana pada Akun Instagram Lambe Turah)”, hlm. 154

¹⁴¹Jeko I.R, Liputan6, Facebook Tutup Ratusan Akun Provokatif, Termasuk Saracen, (<https://www.liputan6.com/tekno/read/3885114/facebook-tutup-ratusan-akunprovokatif-termasuk-saracen>, diakses pada 2 Februari 2021, Pukul 10:07 WIB)

¹⁴²Koran Sindo, Akun Palsu Merajalela, Masyarakat Harus Waspada, http://koransindo.com/page/news/20180211/0/0/Akun_Palsu_Merajalela_Masyarakat_Harus_Waspada, (diakses pada 17 Februari 2021, Pukul 10:56 WIB)

dirasa belum cukup mampu mengatasi permasalahan ini. Dandi Supriadi, pengamat media sosial dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, mengakui keberadaan akun-akun palsu menghadirkan ancaman serius di dunia maya. Beliau juga menambahkan pemaparannya yaitu “menurut saya, tindakan resmi pemerintah tidak akan pernah bisa menghilangkan fenomena ini karena ini berhubungan dengan sikap mental masyarakatnya. Apalagi, dukungan perangkat hukumnya masih sangat samar-samar, berhubungan undang-undang *cybercrime* yang lengkap belum tersedia.”¹⁴³

Sebagai negara hukum, maka pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan memberikan kepastian hukum bagi korban tindak pidana ujaran kebencian di media sosial dari pelaku yang berlindung dibalik akun palsu. Hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.

¹⁴³ Pernyataan Fadli Imran, Ibid

d. Pembuatan Akun Cyborg

Donna Haraway¹⁴⁴ menjelaskan mengenai cyborg sebagai berikut: *A cyborg is a cybernetic organism, a hybrid of machine and organism, a creature of social reality as well as a creature of fiction. Social reality is lived social relations, our most important political construction, a worldchanging fiction. The international women's movements have constructed 'women's experience', as well as uncovered or discovered this crucial collective object. This experience is a fiction and fact of the most crucial, political kind. Liberation rests on the construction of the consciousness, the imaginative apprehension, of oppression, and so of possibility. The cyborg is a matter of fiction and lived experience that changes what counts as women's experience in the late twentieth century. This is a struggle over life and death, but the boundary between science fiction and social reality is an optical illusion.*

Mc Luhan menganggap cyborg ekstensi dari manusia. Otaknya setara komputer, matanya video kamera, telinganya telepon, pembuluh darahnya kabel, darahnya listrik, kaki dan tangannya tungkai mesin. Lalu kalau dia mati atau payah, di-*stroom* atau di-*charge*, akan hidup dan bergairah kembali. Bila marah, karena di otaknya tidak ada *god spot*, semua dihantamnya sampai hancur, tidak peduli apakah itu ibu

¹⁴⁴ Donna Haraway, 1991. "A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and SocialistFeminism in the LateTwentieth Century," in *Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature*, New York: Routledge, hlm. 14

atau ayah kandungnya, itulah risiko makhluk *prosthetic*, manusia buatan, yang kadang-kadang sulit dikontrol penciptanya.

Dalam internet, yakni *cyberspace*, virtualitas menemukan bentuk sejatinya. Seseorang dalam ruang ini tidak saja menjadi penerima pasif informasi atau imagi (seperti dalam film atau acara televisi), tapi juga dapat dengan aktif memproduksi; bahkan seseorang dapat memvirtualisasikan dunia dirinya. Cyborg digunakan dan dimanfaatkan oleh para buzzer untuk menghancurkan kepercayaan masyarakat pada media sosial agar semua yang ada di media sosial dianggap hoax, bahkan cyborg dapat memicu dan menjadi ledakan bagi manusia untuk saling menghina satu sama lain di dalam dunia maya.

Penyebaran propaganda buzzer selalu memiliki target dalam menuntaskan kinerjanya, adapun propaganda tersebut :

- a. Memecah belah masyarakat 34%
- b. Menjatuhkan lawan politik atau oposisi 89 %.
- c. Membuat khalayak Pro kepada Pemerintah atau partai politik 71%

Penetrasi Internet di negara Indonesia, sudah mencapai 157 juta pengguna Internet dengan pengguna media sosial sebanyak 120,6 Juta dengan rincian penggunaan akun media sosial facebook 71,9 juta pengguna, instagram 58,1 juta pengguna, youtube 50,8 juta, dan google 92,1 juta pengguna, Bahkan banyak issue yang

mengungkapkan bahwa pemerintah memelihara buzzer untuk melawan kritik dari masyarakat. Namun, hal ini ditolak oleh staff kepresidenan dengan memberikan pernyataan bahwa buzzer-buzzer tersebut merupakan penggemar yang fanatik terhadap pemerintah. Buzzer selalu bekerja dengan baik dan rapi untuk membuat para pembaca percaya pada mereka tentang informasi yang didapatkan.

1. Jenis – Jenis Berita Bohong (*Hoax*)

Berita bohong (*hoax*) mempunyai beberapa jenis diantara lain adalah:¹⁴⁵

- a. *Fake news*: Berita yang menggantikan atau membuat kebohongan dari berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidak benaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal – hal yang tidak benar dan membuat suatu berita itu semakin baik serta semakin buruk.
- b. *Clickbait* (Tautan jebakan): Tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca untuk membuka suatu konten yang muncul.

¹⁴⁵*Ibid*, hlm. 62

- c. *Confirmation bias* (Bias konfirmasi): adalah kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebagai bukti dari kepercayaan yang sudah ada.
 - d. *Misinformation*: Informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu.
 - e. *Satire*: Sebuah tulisan yang menggunakan humor (lelucon), hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat.
 - f. *Post-truth* (Pasca-kebenaran): Kejadian dimana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik.
 - g. *Propaganda*: adalah aktifitas menyebar luaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.
2. Ciri – Ciri Berita Bohong (*Hoax*)
- Suatu berita dapat dikatakan sebagai berita bohong (*hoax*) jika memiliki ciri – ciri seperti berikut:¹⁴⁶
- a. Tidak mengikuti bahkan mengabaikan kaidah 5W+1H
 - b. Terdapat kalimat yang berupa ajakan untuk menyebarkan luaskan ke semua orang dengan sifat memaksa. Semakin mendesak permintaannya semakin mencurigakan pesan tersebut.

¹⁴⁶ Yeha Regina Citra Mahardika, *Perilaku Mahasiswa dalam Menyikapi Pemberitaan Hoax di Media Sosial Facebook (Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2013 yang Menerima Pemberitaan Hoax Terkait Isu Corporate Nasional)*, Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017, hlm. 28 – 29

- c. Bahasa yang digunakan terlalu berempati, serta penggunaan huruf kapital dan tanda seru yang berlebihan.
- d. Jika isi pesan tersebut berupa informasi yang sangat penting, akan tetapi belum ditemukan di media maupun situs resmi.
- e. Tidak konsisten dan bertentangan dengan akal sehat belum ada penelitian yang menganalisis.
- f. Pesan telah di *forward* (teruskan) berulang kali.
- g. Untuk meyakinkan agar suatu berita dapat dipercaya, seringkali disebutkan sumber resminya namun tidak bisa menyebutkan nama narasumber perseorangan, perusahaan, organisasi, dan rujukan lainnya yang memiliki otoritas.
- h. Tidak menggunakan bahasa yang baku baik dan benar.

Menurut David Harley dalam buku *Common Hoaxes and Chain Letters*, ada beberapa ciri – ciri yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi *hoax* secara umum. Pertama, berita bohong (*hoax*) biasanya memiliki karakteristik surat berantai dengan menyertakan kalimat seperti "Sebarkan ini ke semua orang yang ada di kontak anda, jika tidak, sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi". Kedua, berita bohong (*hoax*) biasanya tidak menyertakan tanggal kejadian atau tidak memiliki tanggal yang realistis atau yang telah diverifikasi, misalnya "kemarin" atau "dikeluarkan oleh..." pernyataan – pernyataan yang tidak menunjukkan adanya sebuah kejelasan. Kemudian yang ketiga, berita bohong (*hoax*) biasanya tidak memiliki

tanggal kadaluwarsa pada peringatan informasi, meskipun sebenarnya kehadiran tanggal tersebut juga tidak akan membuktikan apa-apa, tetapi dapat menimbulkan efek keresahan yang berkepanjangan. Keempat, tidak ada organisasi yang dapat diidentifikasi yang dikutip sebagai sumber informasi atau menyertakan organisasi tetapi biasanya tidak terkait dengan informasi.¹⁴⁷

B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap *Buzzer* yang Menyebarkan Berita Hoax di Media Sosial

Dalam hukum pidana, konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* berdasar pada suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidanakan seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).¹⁴⁸

¹⁴⁷ Clara Novita Anggraini, *Literasi Media Baru dan Penyebaran Informasi Hoax (Studi Fenomenologi pada Pengguna Whatsapp dalam Penyebaran Informasi Hoax periode Januari-Maret 2015)*, Thesis Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hlm. 31

¹⁴⁸ Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum*, Volume. 6, Nomor. 11 Tahun 1999, hlm. 27

Liability atau pertanggungjawaban bisa dilihat dari segi falsafah hukumnya. Seorang filsafah dalam bidang hukum pada abad ke – 20 yaitu Roscou Pound menjelaskan bahwa *liability* atau pertanggungjawaban sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima oleh pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”.¹⁴⁹

Konsep dari “*liability*” diartikan sebagai “*reparation*”, sehingga terjadilah sebuah perubahan dari arti konsep “*liability*”, dari “*compostion for vengeance*” menjadi “*reparation for injury*”. Perubahan bentuk ganti rugi berupa uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman secara historis merupakan awal dari “*liability*” atau “pertanggungjawaban”.¹⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas, telah dijelaskan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut soal hukum semata, tetapi juga menyangkut soal nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat. Perkembangan masyarakat yang disertai dengan perkembangan teknologi pada abad ke-20 berkembang dengan pesat. Oleh karena itu timbullah perkembangan pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai – nilai kesusilaan umum. Namun inti dari nilai kesusilaan umum tetap tidak berubah, terutama terhadap perbuatan – perbuatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa dan pembunuhan,

¹⁴⁹ Romli Atmasasmita, *Asas – Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hlm. 79

¹⁵⁰ *Ibid*

pemeriksaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa dan badan serta harta benda.¹⁵¹

Roeslan Saleh mengatakan bahwa, petanggung jawab dan pidana adalah suatu ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari – hari baik itu dalam moral, agama, dan hukum.¹⁵²

Ketiga unsur tersebut berkaitan satu sama lain dan bertumpu dalam satu keadaan yang sama, yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan – aturan. Sistem aturan ini dapat bersifat luas dan beragam, meliputi hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya. Persamaan dari ketiga sistem aturan tersebut yaitu bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh setiap kelompok tertentu. Jadi, sistem aturan tersebut merupakan sistem yang melahirkan konsep kesalahan pertanggungjawaban dan pemidanaan itu adalah sistem yang normatif.¹⁵³

Roeslan Saleh memberikan jawaban bahwa bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana yaitu yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatannya.¹⁵⁴ Secara teoritik, perbincangan mengenai pertanggungjawaban pidana pasti didahului oleh ulasan tentang perbuatan pidana sekalipun dua hal tersebut berbeda baik secara konseptual maupun penerapannya dalam praktek penegakan

¹⁵¹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 17

¹⁵² Roeslan Saleh, *Perbuatan..., Op.Cit.*, hlm. 33

¹⁵³ *Ibid*

¹⁵⁴ *Ibid*

hukum. Di dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancam perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan.¹⁵⁵

Konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini didasarkan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.¹⁵⁶ Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).¹⁵⁷

Masalah utama adalah kejahatan masyarakat pengguna media sosial. Hal inilah yang menjadi dasar pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaanya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan UndangUndang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

¹⁵⁵*Ibid*

¹⁵⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali., *Op.Cit.*, hlm. 20

¹⁵⁷*Ibid*

Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang ITE No 11 Tahun 2008, BAB

VII tentang Perbuatan Yang Dilarang, menyebutkan:

“ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang ITE No 11 Tahun 2008, BAB

XI tentang Ketentuan Pidana, menyebutkan:

“ Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sebagaimana diamandemen dengan UU No. 19 Tahun 2016

Pasal 45A ayat 1, yang menyebutkan:

“ 1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berkaitan dengan hal tersebut, lahirnya Undang-Undang tersebut menjadi pengingat dalam menggunakan media sosial, seharusnya punya trik atau cara cerdas, agar media sosial digunakan sebagaimana mestinya dan tidak melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku. Kita harus sadari bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara pengguna internet dan media sosial terbesar di dunia sehingga penerapan etika / ketaatan hukum dalam masyarakat sangat dibutuhkan agar terhindar dari kejahatan di dunia maya.

Pada penelitian tentang berita bohong atau *Hoax* ini tercakup di dalam kejahatan dunia maya atau *Cyber Crime* dimana salah satu tindak pidana dari *Cyber Crime* itu adalah menyebarkan berita bohong melalui media elektronik atau *Hoax*. *Cyber Crime* merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak boleh dilakukan oleh semua orang. *Cyber Crime* adalah kejahatan yang dilakukan dalam dunia maya melalui komputer atau internet. *Cyber Crime* termasuk dalam kategori tindakan kejahatan kriminal. *Cyber Crime* telah banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. *Cyber Crime* bisa dilakukan oleh orang yang menguasai bidang teknologi. *Cyber Crime* bisa dilakukan dimana saja sesuai dengan keinginan pelaku. Pelaku *Cyber Crime* bisa disebut dengan *Hacker*. *Hacker* akan menyerang sistem komputer untuk melancarkan usahanya untuk melakukan kejahatan dalam dunia maya. *Hacker* bisa saja mencuri data pribadi anda, dan melakukan pembobolan kredit. Banyak jenis kejahatan *Cyber Crime* yang bisa dilakukan oleh sang *Hacker*. Banyak jenis-jenis *Cyber Crime* yang harus diketahui untuk menjaga keamanan data dan sistem komputer. Berikut adalah jenis-jenis *Cyber Crime*:

1. Masuk ke akun orang lain dengan sengaja (*Unauthorization Access*)

Masuk ke akun orang lain dengan sengaja bisa dikategorikan dalam kejahatan cybercrime. Kejahatan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai macam akun, bahkan akun komputer

pribadi. Ketika seseorang bisa masuk ke akun orang lain, akan banyak resiko yang bisa terjadi, antara lain:

- a. Seseorang tersebut bisa mencuri data dalam akun atau komputer.
- b. Seseorang tersebut bisa menghapus data dan informasi yang ada dalam akun atau Komputer
- c. Seseorang bisa menggunakan akun orang lain untuk kejahatan, seperti melakukan penipuan terhadap orang lain dengan mengatasnamakan nama kita.

2. Menyebarkan konten-konten ilegal (*illegal Content*)

Perkembangan teknologi yang semakin cepat berjalannya waktu, semua orang bisa mengakses segala hal hanya dengan menggunakan internet. Penyebaran konten ilegal termasuk dalam jenis cybercrime karena hal ini sangat mengganggu pengguna internet lainnya. Konten ilegal yang disebarcan bisa berupa pornografi, atau berita hoax yang sangat mengganggu keresahan masyarakat.

3. *Carding*

Carding adalah penggunaan kartu kredit milik orang lain, umumnya milik orang lain di luar negeri untuk digunakan bertransaksi hal yang lain. *Carding* sangat dilarang oleh dunia internasional karena dapat 60 menyebabkan kerugian pada sasaran carding. Saat ini, Indonesia juga melarang adanya carding. Semua

transaksi yang dilakukan dengan melibatkan luar negeri akan diseleksi dengan ketat sesuai aturan yang ada.

4. *Cyber Squatting*

Cyber Squatting adalah tindakan *cyber crime* yang dilakukan dengan cara menjual domain suatu perusahaan ke perusahaan itu sendiri dengan harga yang sangat mahal. Hal ini dikategorikan menjadi *cyber crime* karena merugikan pihak perusahaan.

5. *Cyber Typosquatting*

Cyber Typosquatting adalah tindakan meniru website orang lain atau perusahaan lain dengan menyebarkan berita atau info penipuan. Hal ini dikategorikan sebagai *cyber crime* karena dapat merugikan orang lain dan perusahaan. Membuat informasi palsu dan menyebarkan informasi tersebut ke masyarakat umum.

6. *Hacking*

Hacking adalah tindakan *cyber crime* yang dilakukan oleh hacker. Hacking bisa dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa diantaranya adalah menduplikasi sebuah web untuk penipuan, melakukan DDOS, dan masih banyak yang lainnya.

7. *Cyber Espionage*

Cyber Espionage merupakan tindakan kejahatan kriminal dalam dunia teknologi. *Cyber Espionage* digunakan untuk memantau sesuatu dengan cara masuk ke dalam jaringan seseorang tanpa izin. Hal ini bisa menimbulkan banyak resiko. Data dan informasi dalam

jaringan bisa saja dicuri dan disebar ke umum, padahal data dan informasi tersebut adalah hal yang sangat rahasia.

Dijelaskan juga berita bohong (*hoax*) dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28, yang berbunyi:

Ada dua bentuk perbuatan pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 28, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Perbuatan pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam ayat (1) terdiri dari unsur – unsur berikut:¹⁵⁸

- a. Kesalahan: dengan sengaja.
- b. Melawan hukum: tanpa hak.
- c. Perbuatan: menyebarkan.
- d. Objek: berita bohong dan meyesatkan.
- e. Akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur-unsur perbuatan pidana dalam ayat (2) adalah:¹⁵⁹

- a. Kesalahan: dengan sengaja.
- b. Melawan hukum: tanpa hak.
- c. Perbuatan: menyebarkan.
- d. Objek: informasi.

¹⁵⁸ Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm. 128

¹⁵⁹ Ester Krisnawati, *Loc. Cit.*, hlm. 178

- e. Tujuan: untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Unsur – unsur formal yang membentuk rumusan perbuatan pidana ada dua yaitu, secara materil dan formal :

1. Bentuk pertama dirumuskan secara materil

Perbuatan pidana Informasi dan Transaksi Elektronik pertama dirumuskan secara materil. Perbuatan pidana tersebut selesai sempurna bila akibat perbuatan telah timbul. Perbuatan menyebarkan berita bohong (*hoax*) yang menyesatkan telah menimbulkan akibat berupa adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.¹⁶⁰

Unsur lain yang terdapat dalam perumusan materil yaitu, sengaja artinya si pembuat menghendaki untuk menyebarkan berita bohong (*hoax*) serta menyesatkan, dan menghendaki atau setidaknya menyadari timbulnya suatu akibat kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Si pembuat juga mengerti bahwa apa yang dilakukannya itu tidak dibenarkan (sifat melawan hukum subjektif), dan memberi berita yang isinya bohong dan mengerti dengan demikian akan mengakibatkan kerugian bagi konsumen transaksi elektronik.

¹⁶⁰ Lailatul Utiya Choirroh, *Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam*, Al - Jinayah: *Jurnal Hukum Pidana Islam*”, Volume 3, Nomor 2, 2017, hlm. 332

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya.¹⁶¹

Sifat melawan hukum dirumuskan dalam kata “tanpa hak” bercorak dua; objektif dan subjektif. Corak objektif adalah sifat selama perbuatan tersebut diletakkan pada suatu kebohongan dan menyesatkan dari isi suatu berita yang disebarkan. Sementara corak subjektif terletak pada kesadaran isi pembuat/pelaku tentang dicelanya perbuatan semacam itu di masyarakat yang diformalkan dalam undang-undang. Bila dilihat dari sudut sifat tercelanya perbuatan yang diletakkan pada isi berita dan akibatnya bagi pengguna atau konsumen transaksi elektronik, maka mencantumkan unsur “tanpa hak” dirasa berlebihan karena tidak mungkin terdapat orang yang menyebarkan berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen transaksi elektronik yang dibolehkan.¹⁶²

2. Bentuk kedua dirumuskan secara formal

Kesamaan dengan bentuk pertama ialah mengenai unsur sengaja, tanpa hak dan perbuatan menyebarkan. Jika bentuk pertama secara jelas merupakan perbuatan pidana materiil. Dari kata “mengakibatkan menyesatkan” sangat jelas, disyaratkan akibat harus timbul agar tindak pidana menjadi sempurna.

¹⁶¹ Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Op.Cit.*, hlm. 129

¹⁶² Lailatul Utiya Choirroh, *Loc.Cit*

Namun bentuk kedua ini tidak begitu jelas, ketidak jelasan itu bisa menimbulkan perbedaan pendapat.¹⁶³

Pendapat pertama, perbuatan pidana formil. Selesainya tindak pidana diletakkan pada selesainya perbuatan. Alasannya dalam rumusan tidak secara tegas melarang menimbulkan akibat tertentu. Frasa “ditujukan untuk...” dapat diartikan bahwa perbuatan menyebarkan informasi ditujukan agar muncul rasa kebencian dan sebagainya. Artinya tujuan tidak berbeda dengan “maksud”. Sedangkan rasa kebencian antar agama atau antar golongan dan sebagainya tidak perlu benar – benar telah terjadi perbuatannya. Pendapat ini memerlukan pembuktian, bahwa perbuatan menyebarkan ditujukan agar timbulnya rasa kebencian dan sebagainya.¹⁶⁴

Cara untuk membuktikan apakah timbul rasa benci dan sebagainya yaitu keadaannya dapat menimbulkan kebencian antara golongan dan sebagainya, yang semula disadari dan di hendaki si pembuat. Melogikan ini harus disertai dengan pengungkapan keadaan-keadaan/fakta yang ada sekitar dan pada saat perbuatan dilakukan, sifat dan keadaan isi informasi yang disebarkan, latar belakang objektif dan subjektif si pembuat, dan

¹⁶³ *Ibid*, hlm. 333

¹⁶⁴ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Op.Cit.*, hlm. 132

sebagainya. Kiranya sama seperti dengan cara membuktikan unsur sengaja.¹⁶⁵

Pendapat kedua, termasuk perbuatan pidana materil. Perbuatan pidana selesai sempurna akibat adanya rasa kebencian atau permusuhan antar kelompok masyarakat telah timbul. Alasannya ada dua pertama, cara merumuskan poin kedua sama persis dengan cara merumuskan tindak pidana penipuan (oplichting) Pasal 378, atau pemerasan Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai penipuan dan pemerasan tersebut adalah perbuatan pidana materil.¹⁶⁶

Selain di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berita bohong (*hoax*) juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai dasar acuan untuk memidanakan para pelaku penyebar berita bohong (*hoax*), di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁶⁷

1. Pasal 311 ayat (1)

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

¹⁶⁵ Lailatul Utiya Choirroh, *Op.Cit.*, hlm. 334

¹⁶⁶ Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Loc.Cit*

¹⁶⁷ Abigail Sekar Ayu Asmara, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, *Pemidanaan Terhadap Pelaku “Hoax” dan Kaitanya Dengan Konsep Keadilan Restoratif*, dalam Diponegoro Law Journal, Volume 7, Nomor 2, 2020, hlm.152

2. Pasal 378

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

3. Pasal 390

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

Dalam pasal 390 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini terdapat frasa yang sama seperti di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu, menyiarkan kabar bohong. Di dalam buku R. Soesilo terdapat beberapa poin dari pasal 390 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu:

- a) Terdakwa hanya dapat dihukum menurut pasal ini apabila, ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. kabar bohong tidak hanya dipandang sebagai memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak benar tentang suatu kejadian.
- b) Menaikkan atau menurunkan harga barang – barang dan sebagainya, dengan menyiarkan kabar bohong itu hanya dapat hukum, bahwa penyiaran kabar bohong itu dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Orang yang menaikkan harga barang – barang dagangan atau surat – surat berharga dengan jalan memborong atau membeli secara besar – besaran, itu tidak dihukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Cara Kerja *Buzzer* dalam Penyampaian Informasi di Media Sosial menggunakan akun anonymous, membuat dan menjalankan akun bot, membuat dan menggunakan akun palsu (*fake account*), dan membuat akun cyborg untuk mengerahkan, menyerang seseorang atau sekelompok orang yang digunakan untuk melakukan penyebaran propaganda buzzer yang bertujuan untuk memecah belah masyarakat, menjatuhkan lawan politik atau oposisi, dan membuat khalayak Pro kepada Pemerintah atau partai politik.
2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap *Buzzer* yang Menyebarkan Berita Hoax di Media Sosial diatur dalam Pasal 45 A ayat (1) dan Pasal 311 Ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 yang sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

B. Saran

Dalam hal ini penulis ingin memberikan saran dalam penelitian ini :

1. Dalam Penyebaran Informasi yang dilakukan oleh para Buzzer di Media Sosial, masyarakat diharuskan mencari tahu kebenarannya dengan menemukan beberapa informasi lainnya terkait dengan informasi yang didapat. Selain itu, pemahaman terhadap para Buzzer yang melakukan propaganda di Media Sosial harus cermat, masyarakat juga dilarang menyebarkan informasi apapun yang beritanya simpang siur dan dapat menjerumuskan kepada ujaran kebencian dan pemberitaan bohong yang dilakukan oleh para Buzzer melalui Media Sosial.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap Buzzer yang menyebarkan berita bohong dan melakukan ujaran kebencian melalui media sosial diperlukan sebuah regulasi yang lebih solutif agar lebih tepat untuk mengkategorikan seorang dianggap sebagai buzzer atau hanya korban dari buzzer agar hukum yang berlaku di Indonesia tetap melindungi hak asasi manusia. Karena belum adanya identifikasi pengertian jelas tentang buzzer dapat menyebabkan kekacauan berfikir yang menimbulkan penafsiran ganda dalam penegakan hukum di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kholiq,Muhamad. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*,Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2002
- Adami,Chazawi, dan Ferdian Ardi.*Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta :PT. Rajagrafindo Persada, 2016
- Ali,Mahrus.*Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Jakarta :Sinar Grafika, 2015
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke- 9, Jakarta : Sinar Grafika, 2017
- Amrani,Hanafi, dan Mahrus Ali.*Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta :Rajawali Pers, 2015
- Andriadi, Fayakhun. *Demokrasi di tangan Netizen*, Jakarta : RM Books, 2016
- Anwar, Rosihon. et al., *Pengantar Studi Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2009
- Arbie, Rivani. *Twitter is Money*, Jakarta: Mediakita, 2013.
- Atmasasmita,Romli.*Asas – Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta : Yayasan LBH,1989
- Bungin,B. *Sosiologi Komunikasi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- Chazawi,Adami.*Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002
- Chazawi,Adami,& Ardi Ferdian.*Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*,Malang :Media Nusa Creative, 2015
- Effendi,Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung :PT. refika Aditama, 2011
- Eka Safitri, Buty. et al., *Peranan Buzzer Politik Membentuk Opini Masyarakat Melalui Pemilu Di Media Sosial*, Tangerang : Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2019
- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*,Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015
- Firmansyah,*Marketing Politik :Antara Pemahaman dan Realitas*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 1989

- Hadi Utomo, Warsito. *Hukum Kepolisian di Indonesi*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005
- Hakam Chozin, Fajrul. *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah*, Sumatra : Alpha Grafika, 1997
- Haraway, Donna. "A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and SocialistFeminism in the LateTwentieth Century," in *Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature*, New York: Routledge, 1991
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana, 2006
- Johan Nasution, Bahder. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta :Rineka Cipta, 2005
- Kotler, Philip and Gary Armstrong. *Prinsip Prinsip Pemasaran*, Edisi13. Jilid 1. Jakarta: Erlangga, 2012
- Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung :Sinar Baru, 1984
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Marpaung, Leden. *Asas –Teori-Praktik- Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, Jakarta :Sinar Grafika, 2005
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Cet. Ke-8, Jakarta :Renika Cipta, 2008
- Mulyana, D. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (2014), Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Nasution, Enda. *Perbedaan Istilah Buzzer dan Influecer*, Jakarta : Raja Grafindo, 2016
- O.S Hiariej, Eddy. *Prinsip – Prinsip Hukum Pidnaa*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014

- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : PT. Eresco, 2015
- Sudarto, *Diktat Hukum Pidana Jilid A-B*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cet. Ke-3, Jakarta : Aksara Baru, 1981
- Sianturi, SR. *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Ahaem Patehaem, Jakarta, 1986
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. ke – 11., Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Tongat, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonsia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang : UMM Press, 2008
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : PT Grafindo, 2002
- Wiyanto, Roni. *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2012

Jurnal

- Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum*, Vol. 6, Nomor. 11 Tahun 1999
- Juliadi, Rismi. “The Construction of Buzzer Identity on Social Media (A Descriptive Study of Buzzer Identity in Twitter)”, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, *Jurnal Internasional*, Vol 150, 2017
- Kurnia, Ari. “Fenomena Akun Anonim Di Media Sosial Sebagai Sumber Informasi Dan Ekonomi (Analisis Wacana pada Akun Instagram Lambe

- Turah)”, *Journal Communication Spectrum*, Vol. 4 No. 2 Februari – Juli, 2017
- Loisa Felicia, Riris. “Peran Buzzer Politik dalam Aktivitas Kampanye di Media Sosial Twitter”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 2, No. 2, 2018
- Rusli, Hardijan. Metode Penelitian Hukum Normatif, *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. 5, No. 3, 2006
- Sekar Ayu Asmara, Abigail, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta. Pemidanaan Terhadap Pelaku “Hoax” dan Kaitanya Dengan Konsep Keadilan Restoratif, dalam *Diponegoro Law Journal*, Vol 7, Nomor 2, 2020
- Sugono Shiqid, Fenomena Industri Buzzer di Indonesia : Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.4, 2020
- Utiya Choirroh, Lailatul. *Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam*, Al - Jinayah: *Jurnal Hukum Pidana Islam*”, Vol 3, Nomor 2, 2017

Prosiding

- Anisa, Renata, dan Rachmaniar, *Hoax Politik pada Media Sosial Instagram: Studi Enografi Virtual tentang Keberadaan Instagram dan Hoax Politik*, Makalah Disampaikan dalam Prosiding Seminar Nasional Komunikasi Jurnal Fisip UNILA, Tahun 2016
- Juditha. Christiany, “*Buzzer di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu Indonesia*”, Prosiding Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika. Jakarta, 2019
- Kartanegara. Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliyah bagian Dua*, Prosiding, Balai Lektur Mahasiswa, 1998
- Krisnawati. Ester, “Mempertanyakan Privasi Di Era Selebgram: Masih Adakah”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 13 Nomor 2, Desember 2016

Tesis

- Novita Anggraini. Clara, *Literasi Media Baru dan Penyebaran Informasi Hoax (Studi Fenomenologi pada Pengguna Whatsapp dalam Penyebaran*

Informasi Hoax periode JanuariMaret 2015), Thesis Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta, 2016

Skripsi

Irawan Sitepu.Ricky, *Eksistensi Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah DIY dalam Penanggulangan Tindak Pidana yang Berbasis Teknologi Informasi*, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum dan program kekhususan Pradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2015

Kurniawan, Mohamad Imam, “*Proses Simultan Dalam Pembentukan Opini Melalui Media Sosial “, Studi Kasus Buzzer Dalam Kontestasi Pemilihan Presiden*”, Skripsi Sarjana Hukum, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019

Regina Citra Mahardika.Yeha, *Perilaku Mahasiswa dalam Menyikapi Pemberitaan Hoax di Media Sosial Facebook (Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2013 yang Menerima Pemberitaan Hoax Terkait Isu Corporate Nasional)*, Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017

Makalah

Christiany Juditha, *Buzzer di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu Indonesia*, Manado : Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Komunikasi dan Informatika, Prosiding Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika #3 Tahun 2019

Reinhard Golose.Petrus, Makalah pada Seminar Nasional yang diselenggarakan di Menara Sjafruddin Prawiranegara Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, tentang *Perkembangan Cybercrime Dan Upaya Penanganannya Di Indonesia Oleh Polri*, Jakarta, 10 Desember 2006

Website

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012 Departemen Pendidikan Nasional, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/media%20elektronik>

Bramy Biantoro, *4 Bahaya mengintai dari kabar hoax di dunia maya*, <https://www.merdeka.com/teknologi/4-bahaya-mengintai-dari-kabar-hoax-di-dunia-maya/hoax-buang-buang-waktu-dan-uang.html>
dictionary.cambridge, <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hoax#translations>,

Ilham, Nasional Republika, *Hoax Merupakan Kabar Direncanakan*,
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/01/11/ojm2pv361-ahli-hoaxmerupakankabar-yang-direncanakan>

Jeko I.R, Liputan6, Facebook Tutup Ratusan Akun Provokatif, Termasuk Saracen, <https://www.liputan6.com/tekno/read/3885114/facebook-tutup-ratusan-akunprovokatif-termasuk-saracen>

Jonathan Patrick, *Taktik Licik Buzzer Politik*, pada website :<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201210130825-185-352433/taktik-licik-buzzer-politik>,

Koran Sindo, Akun Palsu Merajalela, Masyarakat Harus Waspada, http://koransindo.com/page/news/20180211/0/0/Akun_Palsu_Merajalela_Masyarakat_Harus_Waspada

Levina Jescelind V, *Macam – Macam dan Pengertian Polisi Beserta Tugasnya*, dalam <http://scdc.binus.ac.id/fopasbin/2017/07/macam-macam-dan-pengertian-polisi-beserta-tugasnya/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt564aecdae930b/telan-banyak-korban-dpr-diminta-revisi-uu-ite?page=1>

<https://akurat.co/iptek/id-1139969-read-fakta-fakta-anonymous-kelompok-hacker-paling-berpengaruh-di-dunia-tertarik-gabung#:~:text=AKURAT.CO%2C%20Anonymous%20adalah%20kelompok,online%20yang%20dilakukan%20oleh%20pemerintah.>

<https://lifestyle.bisnis.com/read/20201218/220/1332660/twitter-bakal-labeli-akun-bot-secara-otomatis-tahun-depan>

<https://www.marketeers.com/awas-ini-bahaya-di-follow-akun-instagram-palsu/>

<https://mediaindonesia.com/teknologi/180586/waspada-akun-bot-di-media-sosial>

<https://divedigital.id/Buzzer-adalah/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Novita Chandra Anisah

NPM : 5117500162

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 07 November 1999

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jalan Ketepeng, Desa Rt 004 / Rw 002, Kecamatan
Dukuhturi, Kabupaten Tegal

Riwayat Pendidikan :

NO.	NAMA SEKOLAH	TAHUN MASUK	TAHUN LULUS
1	SD N NEGERI PEPEDAN 01	2005	2011
2	SMP PONDOK MODERN SELAMAT	2011	2014
3	SMK PENERBANGAN KARTIKA AQASA BHAKTI	2014	2017
4	S1 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCA SAKTI TEGAL	2017	2021

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 29 Juli 2021

Hormat saya,



Novita Chandra Anisah